Dampak Regulasi Zakat terhadap Penguatan BAZNAS sebagai Lembaga Pemerintah Nonstruktural

Studi Kasus

BAZNAS Provinsi Nusa Tenggara Barat

BAZNAS Kabupaten Sukabumi

BAZNAS Kabupaten Cianjur

BAZNAS Kabupaten Musi Banyuasin

BAZNAS Kota Padang Panjang

Pusat Kajian Strategis BAZNAS

Dampak Regulasi Zakat terhadap Penguatan BAZNAS sebagai Lembaga Pemerintah Nonstruktural

Studi Kasus

BAZNAS Provinsi Nusa Tenggara Barat

BAZNAS Kabupaten Sukabumi

BAZNAS Kabupaten Cianjur

BAZNAS Kabupaten Musi Banyuasin

BAZNAS Kota Padang Panjang

Pusat Kajian Strategis BAZNAS

Dampak Regulasi Zakat terhadap Penguatan BAZNAS sebagai Lembaga Pemerintah Nonstruktural

Studi Kasus BAZNAS Provinsi Nusa Tenggara Barat, BAZNAS Kabupaten Sukabumi, BAZNAS Kabupaten Cianjur, BAZNAS Kabupaten Musi Banyuasin, BAZNAS Kota Padang Panjang
Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional & Universitas Darussalam Gontor

Kata Pengantar Ketua BAZNAS:

Prof. Dr. K.H. Noor Achmad, M.A.

Kata Pengantar Wakil Rektor Universitas Darussalam Gontor:

Dr. Setiawan bin Lahuri, Lc., M.A.

Penyusun:

Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional
Universitas Darussalam Gontor

Penyunting:

Anggota BAZNAS
Direktur Utama BAZNAS
Sekretaris BAZNAS
Direktur Pengumpulan BAZNAS
Direktur Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS
Direktur Operasi BAZNAS
Direktur Kepatuhan dan Audit Internal BAZNAS

Penerbit:

Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS)
Jl. Matraman Raya No. 134, Jakarta 13150
Phone +6221 3904555
Email: puskas@baznas.go.id
www.baznas.go.id; www.puskasbaznas.com

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dengan bentuk dan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit

Gambar Kulit: Ulfah Lathifah, B.Sc.

Tata Letak: Adhitya Kusuma Zaenardi

ISBN: 978-623-6614-97-6

TIM PENYUSUN KAJIAN

Penasihat

: Prof. Dr. K.H. Noor Achmad, M.A.
Mokhamad Mahdum, SE, MIDEc, Ak, CA, CPA, CWM
Ir. H. Muhamad Nadratuzzaman Hosen, MS.M.Ec, Ph.D.
Dr. Zainulbahar Noor, SE, M.Ec.
Saidah Sakwan, M.A.
Rizaludin Kurniawan, S.Ag., M.Si.
Kolonel (Purn) Drs. Nur Chamdani
Achmad Sudrajat, Lc, M.A.
Prof. Dr. Phil. H. Kamaruddin Amin, M.A.
Suminto, M.Sc., Ph.D.
Dr. Ir. Muhammad Hudori, M.Si.
M. Arifin Purwakananta
Dr. H. Ahmad Zayadi, M.Pd.

Penanggung Jawab

: Muhammad Hasbi Zaenal, Ph.D.

Penulis

(Tim Universitas Darussalam Gontor)

Adib Susilo, S.H.I., M.S.I.
Alfarid Fedro. S.Ag., M.H.
Apriliana Ika Kusumanisita, M.Sc.
Atika Rukminastiti Masrifah, M.E.Sy.
Fajar Surya Ari Anggara, S.T.P., M.M.
Dr. Khoirul Umam, M.Ec.
Meichio Lesmana, M.E
Mohammad Ghozali, S.H, M.A. Ph.D.
Mohammad Zen Nasrudin Fajri, M.Ec.
Mufti Afif, Lc., M.A
Muhammad Abdul Aziz, S.H.I., M.Si.
Muhammad Irkham Firdaus, M.H.
Royyan Ramdhani Djayusman, M.A.
Soritua Ahmad Ramdani Harahap, M.H.
Yunita Wulandari, M.H.

(Tim Puskas BAZNAS)

Aisha Putrina Sari, M.S.M.
Adhitya Kusuma Zaenardi, S.E.
Dita Anggraini, S.E.

KATA PENGANTAR

KETUA BAZNAS

Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakatuh

Adanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin menguatkan peran zakat dalam mendorong pembangunan di Indonesia. Dalam undang-undang tersebut, BAZNAS merupakan pelaku utama pengelolaan zakat yang mandiri dan memiliki status sebagai lembaga pemerintah nonstruktural (LPNS) serta bertanggungjawab kepada presiden melalui Menteri Agama. Dalam implementasinya, Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tersebut juga diikuti oleh regulasi-regulasi lainnya pada tingkat daerah yang memiliki tujuan serupa yaitu untuk mendukung pengelolaan zakat semakin baik pada tiap level. Meskipun, mengingat Indonesia merupakan negara yang terdiri dari 34 Provinsi dan 512 kabupaten/kota, memang belum semua daerah memiliki regulasi terkait dengan pengelolaan zakat. Padahal regulasi terkait zakat penting dimiliki oleh setiap level daerah agar pengelolaan zakat semakin maju. Dalam hal ini, daerah yang sudah memiliki regulasi terkait zakat pun belum terimplementasi dengan sempurna pada praktiknya dan menyebabkan peran zakat sebagai LPNS menjadi belum optimal. Berangkat dari pemikiran tersebut, kajian mengenai praktik baik dari pengelolaan zakat oleh BAZNAS sebagai LPNS dengan dukungan regulasi pada tingkat daerah menjadi perlu dilakukan.

Buku yang bekerjasama dengan Universitas Darussalaam Gontor ini akan membahas mengenai penguatan BAZNAS sebagai Lembaga Pemerintah Nonstruktural pada lima BAZNAS terpilih yaitu BAZNAS Provinsi Nusa Tenggara Barat, BAZNAS Kabupaten Cianjur, BAZNAS Kabupaten Sukabumi, BAZNAS Kota Padang Panjang, dan BAZNAS Kabupaten Musi Banyuasin. Pemilihan BAZNAS tersebut diharapkan dapat mewakili potret pengelolaan zakat yang telah didukung oleh regulasi di daerahnya, baik berupa peraturan daerah dan atau peraturan kepala daerah.

Terbitnya kajian ini juga tidak lepas dari bantuan seluruh pihak termasuk kerjasama dari BAZNAS Provinsi, BAZNAS Daerah dalam hal proses pengumpulan data. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah dilakukan. Kami juga menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Setiap saran dan masukan yang diberikan sangat berharga bagi perbaikan karya-karya kami di masa depan. Akhir kata, semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak serta menjadi amal jariyah bagi kita semua. *Aamiin*.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA
Ketua BAZNAS

KATA PENGANTAR

WAKIL REKTOR

UNIVERSITAS DARUSSALAM

GONTOR

Assalamu'alaykum warohmatullahi wabarokatuh

Dengan potensi besar penduduk Muslim di Indonesia, diharapkan zakat dapat diberdayakan dan dimanfaatkan untuk penguatan ekonomi di masyarakat. Potensi ini sekaligus menjadi tantangan agar kita sebagai muzaki atau sebagai pengelola dapat memaksimalkan pengumpulan zakat. Apalagi dalam masa pandemi atau pasca pandemi ini, zakat sangat diharapkan mampu menjadi fondasi jejaring pengaman sosial di masyarakat.

Zakat dikelola oleh pemerintah melalui BAZNAS harus diperkuat dengan partisipasi masyarakat secara meluas. Masyarakat perlu terlibat dalam edukasi dan literasi tentang zakat. Masyarakat perlu menyadari bahwa zakat adalah tanggung jawab bersama. Tanggung jawab muzaki dalam membayar zakat harus dibarengi dengan tanggung jawab pengelola dalam mendistribusikan zakat. Tanggung jawab pengelola dalam menghimpun dan mengelola zakat harus diperkuat dengan kemampuan mustahik secara berkala berubah menjadi muzaki di waktu yang akan datang. Para akademisi diharapkan mampu memberikan edukasi betapa pentingnya peran zakat terhadap perekonomian di masyarakat. Para pengelola zakat diharapkan dapat menggerakkan semangat muzaki dalam berzakat, dan begitu seterusnya.

Salah satu prinsip dasar Islam dalam pengelolaan zakat adalah kewajiban dalam pengumpulan. Pengelola zakat diberikan legitimasi agama yang kokoh sebagaimana disebutkan dalam Surat At-Taubah: 103. Kata perintah ambilah ini adalah bentuk penegasan bahwa pengelola tidak saja memiliki keajiban dalam pengumpulan, tapi juga dukungan agama yang kokoh. Tentu legitimasi ini tidak akan bisa dilakukan kecuali semua pihak memiliki tanggung jawab bersama dan kesadaran kolektif akan pentingnya zakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Buku ini adalah sedikit dari tanggung jawab bersama para dosen di Universitas Darussalam Gontor dalam rangka memaksimalkan potensi zakat. Kontibusi akademis ini diharapkan mampu memberikan dorongan kepada BAZNAS agar lebih maksimal dalam pengelolaan zakat. Sekaligus dapat memberikan edukasi betapa pentingnya tanggung jawab bersama bagi seluruh komponen masyarakat.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Dr. Setiawan bin Lahuri, Lc., M.A.
Wakil Rektor II - Universitas Darussalam Gontor

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN KAJIAN	i
KATA PENGANTAR KETUA BAZNAS	iv
KATA PENGANTAR WAKIL REKTOR UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
RINGKASAN EKSEKUTIF	1
PENDAHULUAN.....	2
Pengelolaan Zakat di Indonesia	2
BAZNAS sebagai Lembaga Pemerintah Nonstruktural (LPNS) Pengelola Zakat.....	4
Pentingnya Regulasi Pengelolaan Zakat pada Tingkat Daerah untuk Memperkuat Peran BAZNAS sebagai LPNS	7
PENGELOLAAN ZAKAT DAERAH.....	9
Latar Belakang Peraturan Zakat di Daerah	9
Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Zakat	11
Faktor yang Memengaruhi Pelaksanaan Peraturan Zakat	13
DAMPAK REGULASI ZAKAT DAERAH TERHADAP KINERJA PENGUMPULAN BAZNAS.....	16
BAZNAS Provinsi Nusa Tenggara Barat.....	17
BAZNAS Kabupaten Cianjur.....	18
BAZNAS Kota Padang Panjang	19
BAZNAS Kabupaten Musi Banyuasin.....	20
BAZNAS Kabupaten Sukabumi	22
Pemetaan Dalam Perhimpunan Dana Zakat.....	24
DAMPAK REGULASI ZAKAT DAERAH TERHADAP KINERJA PENYALURAN BAZNAS.....	27
Program Penyaluran dan Pendayagunaan BAZNAS Daerah	28
BAZNAS Provinsi Nusa Tenggara Barat	34
BAZNAS Kabupaten Cianjur.....	36
BAZNAS Kota Padang Panjang	37
BAZNAS Kabupaten Musi Banyuasin.....	39
BAZNAS Kabupaten Sukabumi	40
Dampak Regulasi Zakat Daerah Terhadap Kinerja Penyaluran BAZNAS Daerah.....	41
Kendala dalam Penyaluran dan Pendayagunaan Dana Zakat Daerah	42
DAMPAK REGULASI ZAKAT DAERAH TERHADAP PENGUATAN BAZNAS.....	44
Penguatan Kelembagaan.....	44

Penguatan Manajemen	45
Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM).....	46
Penguatan Sarana Prasarana.....	47
Penguatan Jaringan.....	48
BAZNAS Provinsi Nusa Tenggara Barat	49
BAZNAS Kabupaten Cianjur.....	50
BAZNAS Kabupaten Sukabumi	51
BAZNAS Kabupaten Musi Banyuasin.....	53
BAZNAS Kota Padang Panjang	54
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	57
DAFTAR PUSTAKA.....	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Regulasi Penguatan Tata Kelola dan Kelembagaan Zakat.....	4
Gambar 1. 2 Struktur Pengelolaan Zakat di Indonesia	6
Gambar 3. 1 Pengumpulan BAZNAS Provinsi NTB Tahun 2020 dan 2019 dalam Miliar Rupiah.....	17
Gambar 3. 2 Pengumpulan BAZNAS Kabupaten Cianjur Tahun 2020 dan 2019 dalam Rupiah.....	19
Gambar 3. 3 Pengumpulan BAZNAS Kota Padang Panjang Tahun 2020 dan 2019 dalam Rupiah.....	20
Gambar 3. 4 Pengumpulan BAZNAS Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 dan 2019 dalam Rupiah	22
Gambar 3. 5 Pengumpulan BAZNAS Kabupaten Sukabumi Tahun 2020 dan 2019 dalam Rupiah.....	23
Gambar 3. 6 Dampak Regulasi Zakat Daerah terhadap Pengumpulan Zakat ANS & Non-ASN	24
Gambar 4. 1 Bantuan Program Makmur: Pemberian Modal Usaha, Kerja sama dengan Difabel.....	29
Gambar 4. 2 Bantuan Program Makmur: Pemberian Alat Jahitan dan Balai Ternak.....	30
Gambar 4. 3 Bantuan Program Peduli: Rehab RUTILAHU.....	31
Gambar 4. 4 Bantuan Program Cerdas.....	32
Gambar 4. 5 Bantuan Program Sehat.....	33
Gambar 4. 6 Bantuan Program Takwa	33
Gambar 4. 7 Penyaluran BAZNAS Provinsi NTB Berdasarkan <i>Ashnaf</i> dalam Miliar Rupiah.....	34
Gambar 4. 8 Penyaluran BAZNAS Provinsi NTB Berdasarkan Bidang dalam Miliar Rupiah.....	35
Gambar 4. 9 Penyaluran BAZNAS Kabupaten Cianjur Berdasarkan <i>Ashnaf</i> dalam Miliar Rupiah.....	36
Gambar 4. 10 Penyaluran BAZNAS Kabupaten Cianjur Berdasarkan Bidang Tahun dalam Miliar Rupiah	37
Gambar 4. 11 Penyaluran BAZNAS Kota Padang Panjang Berdasarkan Asnaf dalam Miliar Rupiah	38
Gambar 4. 12 Penyaluran BAZNAS Kota Padang Panjang Berdasarkan Bidang dalam Miliar Rupiah	38
Gambar 4. 13 Penyaluran BAZNAS Kabupaten Musi Banyuasin Berdasarkan Asnaf dalam Miliar Rupiah	39
Gambar 4. 14 Penyaluran BAZNAS Kabupaten Musi Banyuasin Berdasarkan Bidang dalam Miliar Rupiah	40
Gambar 4. 15 Penyaluran BAZNAS Kabupaten Sukabumi Berdasarkan Asnaf dalam Miliar Rupiah...	40
Gambar 4. 16 Penyaluran BAZNAS Kabupaten Sukabumi Berdasarkan Bidang dalam Miliar Rupiah .	41
Gambar 5. 1 Penguatan Kelembagaan: Struktur Organisasi BAZNAS Provinsi Nusa Tenggara Barat	44
Gambar 5. 2 Penguatan Manajemen IT: Sistem Informasi Penghimpunan (SIMBA).....	45
Gambar 5. 3 Penguatan Sumber Daya Manusia.....	46
Gambar 5. 4 Penguatan Sarana Prasarana: Gedung Baru BAZNAS Provinsi Nusa Tenggara Barat	48

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam kerangka kehidupan bernegara, konsep zakat selaras dengan falsafah bangsa yang menyebutkan bahwa negara wajib mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana tercantum dalam sila kelima Pancasila. Perwujudan ini diperkuat dalam tujuan bangsa Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Demikian juga, sasaran penerima zakat selaras dengan upaya negara dalam penanggulangan kemiskinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 34 ayat (1) UUD NRI 1945, bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Konsep zakat menumbuhkan sikap gotong-royong dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Banyak faktor yang menyebabkan kesenjangan antara potensi dengan realisasi pengelolaan zakat di Indonesia, salah satunya adalah pengumpulan zakat yang masih bersifat sukarela. Selain Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pemerintah kembali mengeluarkan dukungan dalam bentuk regulasi lain terkait pengelolaan zakat seperti dalam bentuk Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri Agama. Akan tetapi, belum seluruh wilayah di Indonesia telah memiliki regulasi daerah terkait dengan pengelolaan zakat secara umum maupun terkait menunaikan zakat pada lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing.

Pada buku ini dibahas BAZNAS Provinsi dan Kabupaten/Kota yang wilayahnya telah memiliki regulasi daerah terkait pengelolaan zakat. BAZNAS daerah yang terlibat dalam kajian ini antara lain BAZNAS Provinsi Nusa Tenggara Barat, BAZNAS Kabupaten Cianjur, BAZNAS Kabupaten Sukabumi, BAZNAS Kota Padang Panjang, dan BAZNAS Kabupaten Musi Banyuasin. Pada kelima BAZNAS tersebut ditelaah bagaimana peran regulasi daerah terkait zakat terhadap penguatan BAZNAS sebagai LPNS yang berjalan bersama dengan pemerintah daerah dalam mengatasi masalah sosial kemanusiaan.

Sistematika buku dimulai dari gambaran umum regulasi zakat daerah kemudian implikasi peraturan kepala daerah terhadap kinerja BAZNAS. Implikasi tersebut dilihat dari aspek kinerja pengumpulan, kinerja penyaluran, serta penguatan kelembagaan. Pada bagian akhir, dipaparkan rekomendasi dari perspektif regulasi, rekomendasi terkait pengumpulan dan penyaluran, serta rekomendasi penguatan lembaga BAZNAS.

PENDAHULUAN

Zakat merupakan rukun Islam yang keempat dan wajib dilaksanakan oleh umat muslim. Di dalam Al-Qur'an, kewajiban membayar zakat banyak disebutkan bersama dengan kewajiban salat sehingga para ulama berpendapat bahwa mendirikan salat tanpa menunaikan zakat merupakan hal yang sia-sia, karena keduanya dipandang sebagai perkara utama dalam Islam. Salat adalah ibadah yang merupakan hak kepada Allah, sedangkan zakat adalah hak kepada hamba dan Allah. Sehingga kedudukan salat adalah ibadah yang dapat diartikan sebagai hubungan vertikal seorang hamba kepada Tuhan-nya, adapun zakat merupakan ibadah yang bersifat horizontal (sosial) sekaligus vertikal karena setiap ibadah pada hakikatnya berujung kepada pengabdian kepada Allah.

Disamping itu, zakat juga merupakan salah satu instrumen yang memiliki nilai strategis dalam pembangunan masyarakat suatu negara. Zakat merupakan instrumen sosial yang memiliki dampak yang sangat signifikan apabila dikelola dengan baik dan profesional. Iqbal (2014) mengelompokkan zakat sebagai *redistributive pillars* (pilar redistribusi) untuk membantu *extreme poor* (golongan sangat miskin) dan *the poor* (golongan miskin) keluar dari kemiskinan dan akhirnya menjadi *financially included* (terinklusi secara finansial).

Telah disepakati bahwa instrumen zakat menjadi bagian dari assessment terhadap stabilitas sistem keuangan syariah suatu negara, dalam pertemuan *Islamic Development Bank (IDB) Expert Meeting* pada bulan Desember. Zakat dan instrumen sosial Islam lainnya diperkenalkan sebagai satu terminologi baru yang dikenal dengan nama *Islamic social finance* atau keuangan sosial syariah.

Pengelolaan Zakat di Indonesia

Dalam kerangka kehidupan bernegara, konsep zakat sebagai ibadah sosial selaras dengan falsafah bangsa yang menyebutkan bahwa negara wajib mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perwujudan ini diperkuat dalam tujuan bangsa Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana yang tercantum dalam Pancasila dan UUD 1945.

Kesesuaian antara konsep zakat dan falsafah bangsa, salah satunya, dapat dilihat dari sasaran golongan penerima zakat yang juga merupakan sasaran pembangunan nasional, khususnya dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu, praktik zakat sangat relevan dalam menumbuhkan sikap gotong royong *civil society* untuk berperan aktif dalam membantu tercapainya tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil dan makmur.

Perkembangan bidang perzakatan di Indonesia dapat dilihat dari pengumpulan dan penyaluran zakat. Terdapat sejumlah penelitian yang mengkaji penghitungan potensi pengumpulan zakat nasional. Berdasarkan laporan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), potensi zakat nasional mencapai Rp233,8 triliun (Indikator Potensi Pemetaan Zakat (IPPZ), 2019). Sementara menurut hasil penelitian Firdaus, et. al. (2012) potensi zakat mencapai angka Rp217 triliun atau setara dengan 3,40% PDB Indonesia tahun 2010. Potensi tersebut terbagi menjadi 3 (tiga) kelompok besar, yaitu potensi zakat penghasilan individu (rumah tangga) Rp83 triliun, potensi zakat perusahaan baik BUMN maupun swasta Rp117 triliun dan potensi zakat tabungan Rp17 triliun. Sebagai perbandingan, penelitian lain dari UIN Jakarta

& Ford Foundation menyatakan bahwa potensi zakat Indonesia adalah Rp19,3 triliun per tahun, sementara kajian Asian Development Bank (ADB) memprediksi Rp100 triliun per tahun (BAZNAS, 2020).

Dari sisi pengumpulan riil, jumlah zakat yang berhasil dikumpulkan oleh BAZNAS dan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), termasuk Lembaga Amil Zakat (LAZ), resmi di seluruh Indonesia belum mencapai angka yang optimal. Berdasarkan data resmi BAZNAS, diketahui bahwa total pengumpulan zakat nasional baru mencapai angka Rp8,12 triliun pada tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa dana zakat yang terhimpun masih kurang dari lima persen dibandingkan dengan total potensinya.

Praktik zakat di negara dengan populasi mayoritas penduduk muslim masih belum maksimal. Hal ini dapat dilihat, salah satunya dari kesenjangan antara potensi dan realisasi pengumpulan dana zakat di Indonesia. Salah satu faktor penyebabnya adalah rendahnya tingkat kesadaran umat muslim dalam menunaikan kewajiban zakat. Hal ini dapat dilihat dari hasil riset Pusat Kajian Strategis BAZNAS (2019) menyimpulkan bahwa literasi zakat masih tergolong moderat, bahkan pemahaman zakat lanjutan tergolong dalam kategori rendah.

Selain itu, berdasarkan hasil riset Pusat Kajian Strategis BAZNAS (2021), bahwa estimasi dana zakat yang dikelola masyarakat, tanpa melalui kelembagaan zakat, mencapai 30,5 triliun rupiah pada tahun 2020. Artinya, masih banyak umat muslim Indonesia yang membayar zakat secara langsung atau dengan cara tradisional dan tidak melalui OPZ seperti BAZNAS dan LAZ.

Fakta ini sesuai dengan hasil penelitian yang menyimpulkan bahwa di antara penyebab utama rendahnya pengumpulan zakat oleh OPZ di Indonesia adalah masalah sistem yang intinya adalah regulasi (Ascarya & Diana Yumanita, 2018). Sehingga untuk menyelesaikan permasalahan praktik zakat di Indonesia diperlukan sebuah sistem tata kelola terintegrasi yang tecermin dari serangkaian regulasi yang mendukung praktik pengelolaan zakat. Perlu juga diketahui bahwa persoalan tata kelola seperti ini juga dihadapi pada tingkat global.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, sejak Agustus 2014 muncul gagasan untuk memformulasikan suatu dokumen yang dapat menjadi referensi pengelolaan zakat internasional dengan tujuan agar instrumen zakat ini dapat ditingkatkan pengelolaannya. Gagasan ini kemudian diimplementasikan dalam bentuk kegiatan *International Working Group on Zakat Core Principles* (IWG ZCP) yang diinisiasi oleh BAZNAS, Bank Indonesia dan Islamic Development Bank (IDB).

Di Indonesia, upaya mewujudkan pengelolaan zakat yang lebih sistematis terus dilakukan mulai sejak zaman prakemerdekaan, orde lama, orde baru hingga masa pascareformasi. Setelah reformasi, untuk pertama kali regulasi terkait pengelolaan zakat dapat diwujudkan dalam bentuk Undang-Undang (UU), yaitu UU Nomor 38 Tahun 1999.

Selanjutnya, sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan tata kelola dan penguatan kelembagaan zakat, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan UU Nomor 23 Tahun 2011. Selain penguatan tata kelola perzakatan di Indonesia, regulasi tersebut juga mendukung penguatan BAZNAS sebagai Lembaga Pemerintahan Nonstruktural (LPNS). Kemudian, secara umum, BAZNAS memiliki dua tugas utama: (1) mengelola keseluruhan sistem zakat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,

pengendalian, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, serta pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat, (2) melaksanakan fungsi koordinasi terhadap seluruh organisasi pengelolaan zakat (OPZ) di Indonesia.

Regulasi yang dalam bentuk Undang-Undang tersebut kemudian diperinci secara teknis pelaksanaan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 14/2014, yang salah satu poinnya adalah struktur organisasi dan anggota tertinggi BAZNAS yang ditunjuk oleh Presiden. Selain itu, teknis pembayaran zakat dicantumkan dalam Inpres No. 3/2014 yang mewajibkan seluruh kementerian, perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan seluruh lembaga pemerintahan untuk membayar dan mengumpulkan zakatnya melalui BAZNAS.

Adapun pada aspek tata kelola zakat yang dikelola oleh masyarakat melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) diatur dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 333/2015, yang diantaranya menjelaskan klasifikasi dan perizinan untuk pendirian LAZ. Terdapat tiga kategori LAZ, yaitu LAZ Nasional (jika pengumpulan zakat mencapai Rp50 miliar), LAZ Provinsi (jika pengumpulan zakat mencapai Rp20 miliar), LAZ Kabupaten/Kota (jika pengumpulan zakat mencapai Rp3 miliar).

Peraturan-peraturan tersebut di atas menjadi landasan untuk meningkatkan kualitas sistem tata kelola zakat di Indonesia sehingga pada akhirnya tingkat kontribusi zakat akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional.

Gambar 1.1 Regulasi Penguatan Tata Kelola dan Kelembagaan Zakat

BAZNAS sebagai Lembaga Pemerintah Nonstruktural (LPNS) Pengelola Zakat

Tata kelola organisasi pengelolaan zakat di Indonesia saat ini sepenuhnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. UU ini menggantikan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang sebelumnya menjadi landasan hukum bagi organisasi dan tata kerja pengelolaan zakat di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 secara khusus memberikan wewenang kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai pelaksana utama penyelenggaraan zakat di Indonesia. Di samping itu, pemerintah memiliki kemampuan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan zakat oleh BAZNAS.

Perubahan regulasi ini secara signifikan mengubah sistem pengelolaan zakat di Indonesia. Sistem administrasi zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

dapat merefleksikan posisi BAZNAS dalam sistem pemerintahan presidensial sehingga BAZNAS disebut sebagai Lembaga Pemerintah Nonstruktural (LPNS) pengelola zakat.

Setidaknya ada 4 (empat) peran yang kemudian memperkuat kedudukan BAZNAS sebagai LPNS dalam pengelolaan zakat di Indonesia, yaitu: 1) BAZNAS sebagai Amil Zakat Negara; 2) BAZNAS sebagai pengelola zakat nasional yang bertanggung jawab secara organisatoris dan administratif pelaksanaan zakat secara nasional; 3) BAZNAS bukan Ormas atau *Non-Governmental Organization* (NGO); dan 4) BAZNAS memiliki sistem yang modern untuk *good governance* dan *clean government*.

Sebagai amil zakat negara, pemerintah membentuk BAZNAS untuk menjalankan kewenangannya mengelola zakat di tingkat nasional. Hak untuk memungut, mendistribusikan, dan memanfaatkan zakat di tingkat nasional diatur dalam UU No. 23 Tahun 2011. Hingga saat ini BAZNAS memiliki jaringan di 34 BAZNAS Provinsi dan 464 BAZNAS Kota/Kabupaten.

Sebagai pengelola zakat nasional yang bertanggung jawab secara organisatoris dan administratif pelaksanaan zakat secara nasional, BAZNAS mengemban amanah dalam melaksanakan 4 (empat) fungsi operasional dan 2 (dua) fungsi non-operasional.

Fungsi operasionalnya adalah sebagai perencana, pelaksana, pengendali, pelapor dan bertanggung jawab dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Sementara fungsi non-operasionalnya, yaitu: 1) Pemberian pertimbangan pembentukan BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota, yang tertuang dalam Pasal 15; dan 2) Pemberian rekomendasi izin pembentukan LAZ yang tertuang dalam Pasal 18.

Adapun secara teknis, penjelasan operasionalnya tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014. Sesuai dengan PP tersebut, BAZNAS memiliki fungsi tambahan, yaitu: (1) Pemberian pertimbangan pengangkatan unsur pimpinan BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota yang tertuang dalam Pasal 36 dan Pasal 43; dan 2) Pengesahan hak amil dan RKAT BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota yang tertuang dalam Pasal 69.

Dengan tertuangnya fungsi non-operasional tersebut, BAZNAS – Pusat, skala nasional, dibandingkan dengan BAZNAS Provinsi dan BAZNAS di tingkat Kabupaten/Kota) sebenarnya menjalankan dua fungsi secara bersamaan, yaitu fungsi sebagai regulator sekaligus sebagai operator.

Dalam UU dan PP pengelolaan zakat tersebut saling menegaskan bahwa Pemerintahlah yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan zakat di Indonesia, dalam hal ini dilakukan melalui Kementerian Agama. Pengurus BAZNAS diangkat oleh Presiden Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan negara untuk penyelenggaraan zakat di Indonesia setelah melalui musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Selain BAZNAS di tingkat pusat, terdapat pula BAZNAS di tingkat provinsi, BAZNAS di tingkat kabupaten/kota yang didukung oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) di tingkat nasional, LAZ di tingkat provinsi, LAZ di tingkat kabupaten/kota. Dengan adanya 34 BAZNAS Provinsi dan 464 BAZNAS Kota/Kabupaten yang tersebar di seluruh wilayah

Indonesia menandakan bahwa BAZNAS bukanlah institusi seperti Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) ataupun *Non-Governmental Organization* (NGO).

Dengan terbentuknya OPZ saat ini, setiap kepala pemerintahan di Republik Indonesia mulai dari pusat hingga daerah kabupaten/kota pada hakikatnya menjalankan fungsi regulator, mengangkat pimpinan OPZ dan menciptakan lingkungan kondusif untuk administrasi zakat di tingkat wilayah pemerintahannya masing-masing. Sehingga, BAZNAS memiliki sistem yang modern untuk *good governance* dan *clean government*.

Adapun struktur institusi pengelola zakat di Indonesia dapat digambarkan pada gambar berikut:

Gambar 1. 2 Struktur Pengelolaan Zakat di Indonesia
 Sumber: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Pentingnya Regulasi Pengelolaan Zakat pada Tingkat Daerah untuk Memperkuat Peran BAZNAS sebagai LPNS

Salah satu pembumih syariah Islam terhadap realitas sosial adalah dengan mengintegrasikan zakat ke dalam otonomi daerah dan memberlakukannya dalam lingkungan masyarakat muslim. Prinsip pengelolaan zakat memiliki *trademark* yang sama dengan arah pembangunan dalam masa reformasi ini, yaitu otonomi daerah. Hal ini ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagai wujud semangat dalam peningkatan keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga benang merah antara zakat dan pelaksanaan otonomi daerah adalah meliputi proses pemerataan keadilan, demokratisasi, partisipasi masyarakat, dan potensi keragaman daerah.

Runtutan proses tersebut dapat ditemukan pijakannya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pertama, dalam Pasal 3 dijelaskan bahwa fungsi dari UU Zakat adalah upaya peningkatan fungsi dan peranan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini menyiratkan proses pemerataan keadilan yang diatur oleh Undang-Undang.

Kedua, pada Pasal 5 disebutkan kewenangan lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang disebut dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. Hal ini menyiratkan proses demokratisasi dalam pengelolaan zakat dengan melibatkan unsur masyarakat dan pemerintah dalam pengelolaan zakat.

Ketiga, peran serta masyarakat dalam pengelolaan zakat yang sebelumnya bersifat tradisional dan belum terkoordinir karena belum diatur dalam peraturan perundangan, melalui UU ini sudah dapat tertata secara yuridis sebagaimana yang tertuang pada Pasal 8. Regulasi ini mencerminkan bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana zakat yang diakui secara legal formal.

Keempat, dalam Pasal 15 dijabarkan tentang pembentukan BAZNAS pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dibentuk oleh Menteri atas usul Gubernur/Bupati/Wali kota setelah mendapat pertimbangan dan rekomendasi BAZNAS. Selanjutnya, Pasal 16 tentang pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), perusahaan swasta, dan pada tingkat kecamatan serta kelurahan. Sistem pengelolaan zakat melalui UPZ ini merupakan salah satu bentuk upaya mengakomodasi keanekaragaman daerah.

Dengan beberapa pertimbangan di atas, pengelolaan zakat pada tingkat daerah sangat relevan dengan semangat otonomi daerah. Sehingga, keberadaan regulasi terkait tata kelola zakat dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) Zakat menjadi sangat penting untuk melegitimasi BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan kuat.

Selain itu, Perda Zakat juga dapat menggali potensi dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di setiap daerah yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Karakteristik dana ZIS yang potensial harus diatur agar sistem pengelolaan dan manfaat yang dihasilkan menjadi lebih maksimal dan tepat sasaran. Dalam keadaan ideal, pengelolaan zakat dapat menunjang kemandirian ekonomi daerah di mana muzaki berada, untuk kemudian dimanfaatkan dan

didistribusikan kepada mustahik di wilayah yang sama. Inilah kata kunci dari integrasi konsep zakat ke dalam sistem otonomi daerah.

Sebagai catatan akhir, integrasi zakat dan otonomi daerah di berbagai daerah secara normatif dan realitas empiris telah mulai menemukan bentuk yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat di Indonesia. Praktik zakat telah mendapatkan perhatian dan dukungan Pemerintahan Daerah melalui penerbitan Perda pengelolaan zakat yang menjadi landasan dan payung hukum BAZNAS di masing-masing wilayah. Sehingga peran BAZNAS sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dapat lebih mampu berdampak positif pada peningkatan kualitas sistem pengelolaan zakat dalam rangka membantu mewujudkan kesejahteraan sosial-ekonomi di setiap daerah.

PENGELOLAAN ZAKAT DAERAH

Latar Belakang Peraturan Zakat di Daerah

Lahirnya Perda Zakat tidak dapat dipisahkan dari semangat otonomi daerah pada era reformasi. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, menandai perubahan sistem tata kelola pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi.

Melalui otonomi daerah, setiap pemerintah daerah diberikan ruang untuk mengelola sumber daya daerahnya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Oleh karena itu, zakat menjadi salah satu instrumen yang dapat mendukung tujuan otonomi daerah, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan membangun masyarakat yang adil dan makmur (Bariyah, 2018). Hal inilah yang kemudian menjadi faktor yang menjadikan peraturan zakat semakin menjamur baik di pemerintahan tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota.

Semangat otonomi daerah di atas kemudian berlanjut kepada semangat meng-institusikan praktik zakat yang telah lama berjalan sejak sebelum kemerdekaan. Hal ini sangat penting untuk menjamin warga negara untuk dapat mengamalkan ajaran agamanya, dan memberikan perlindungan negara. Upaya inilah yang kemudian melahirkan Undang-Undang Zakat pertama di Indonesia, yaitu UU No. 38 Tahun 1999.

Terbitnya peraturan zakat pada level pemerintah pusat, secara bertahap direspon oleh berbagai pemerintahan daerah dengan menerbitkan Peraturan Daerah Zakat (Perda Zakat). Peraturan daerah ini dapat terwujud tidak hanya atas peran aktif pemerintah daerah, tetapi juga berkat dukungan dari lembaga legislatif DPRD sebagai perwujudan aspirasi masyarakat di daerah. Dengan penerbitan Perda Zakat, maka praktik pengelolaan zakat di masyarakat dapat dikelola lebih baik dan mendapatkan jaminan hukum legal formal perundangan.

Selain itu, geliat perkembangan konsep dan praktik ekonomi Islam juga berperan mendorong proses penerbitan Perda Zakat. Dengan kata lain, pemerintah daerah dapat melihat potensi dari gerakan ekonomi Islam, khususnya zakat sebagai *Islamic Gift Economy* untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat Islam Indonesia (Widiastuti, et al., 2018), untuk kemudian diselaraskan dengan tujuan pemerintah daerah, khususnya dalam bidang sosial dan ekonomi.

Sebagai contoh, dana zakat yang terkumpul disalurkan kepada para mustahik yang mayoritas termasuk kategori penduduk miskin. Sehingga, praktik zakat memiliki dampak terhadap pengurangan angka kemiskinan yang menjadi salah satu fokus pemerintah. Melalui Perda Zakat, diharapkan umat Islam di daerah tidak hanya dapat menjalankan ajaran agama dalam hal ini membayar zakat, infak, sedekah, akan tetapi juga dapat dikelola secara lebih profesional dan maksimal.

Keberadaan Peraturan Zakat Daerah (Perda Zakat) sangat bergantung kepada kebijakan pemerintah di setiap Daerah. Kebijakan pemerintah daerah ini secara khusus tercantum dalam Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Wilayah, bahwa otonomi daerah merupakan hak, wewenang serta kewajiban wilayah otonom untuk mengendalikan, mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan warga setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setelah Undang-Undang No. 38/1999 diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (selanjutnya disebut UU No. 23/2011), keputusan dalam penetapan Perda Zakat oleh Pemerintahan Daerah menjadi isu utama dalam berbagai pembahasan pengelolaan zakat daerah¹.

Salah satu isu yang menarik dalam pembahasan pengelolaan zakat daerah adalah bagaimanakah kedudukan Perda Zakat dalam peraturan perundang-undangan (Nababan, 2018). Dalam sebuah bahasan lain, terdapat Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang juga mengatur pengelolaan zakat, infak maupun sedekah, wakaf serta donasi lainnya yang diakui dalam ajaran agama Islam².

Hal ini masih tercantum dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah³ dalam menentukan kebijakan perihal Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf. Isu ini menjadi penting diperhatikan untuk mengurangi risiko benturan antarregulasi tentang zakat baik secara nasional maupun di daerah.

Selain penerbitan Perda Zakat, implementasi peraturan tersebut juga menjadi sorotan untuk dievaluasi. Terlebih dalam hal upaya peningkatan kualitas pengelolaan zakat daerah yang transparan dan akuntabel. Sebagaimana praktik yang terdapat pada BAZNAS Provinsi Nusa Tenggara Barat, BAZNAS Kabupaten Cianjur Jawa Barat, BAZNAS Kabupaten Sukabumi Jawa Barat, BAZNAS Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, BAZNAS Kota Padang Panjang Sumatera Barat.

Tantangan berikutnya adalah bagaimana pengaturan dan koordinasi antara BAZNAS baik di tingkat pusat maupun daerah dibantu oleh UPZ, dengan LAZ yang didirikan oleh

¹ Adopsi Perda Zakat: Perda Kota Cilegon 4/2001 tentang Zakat, Infak, dan Shadaqah, Perda Kabupaten Karawang 10/2002 tentang Pengelolaan Zakat, Infak, dan Shadaqah, Perda Kabupaten Lombok Timur 9/2002 tentang Pengelolaan Zakat, Perda Kota Solok 13/2003 tentang Pengelolaan Zakat, Perda Kabupaten Pesisir Selatan 31/2003 tentang Pengelolaan Zakat, Infak, dan Shadaqah, Perda Kota Prabumulih 4/2004 tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Shadaqah, Perda Kota Bukittinggi 29/2004 tentang Pengelolaan Zakat, Perda Kabupaten Sidoarjo 4/2005 tentang Pengelolaan Zakat, Perda Kota Makassar 5/2006 tentang Zakat Profesi, Infak, dan Shadaqah, Perda Kota Palopo 6/2006 tentang Pengelolaan Zakat, Perda Kabupaten Purwakarta 3/2007 tentang Pengelolaan Zakat, Perda Kota Bekasi 02/2008 tentang Pengelolaan Zakat, Perda Kabupaten Asahan Nomor 9/2008 tentang Pengelolaan Zakat, Perda Kota Cimahi 2/2008 tentang Pengelolaan Zakat, Perda Kota Semarang 7/2009 tentang Pengelolaan Zakat, Perda Kota Mojokerto 3/2010 tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Shadaqah, Perda Kota Probolinggo 11/2010 tentang Pengelolaan Zakat, Perda Kabupaten Bekasi 2/2011 tentang Pengelolaan Zakat, Perda Kabupaten Sumedang 1/2011 tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Shadaqah

² Adopsi Perda Zakat setelah UU 23/2011 seperti: Perda Kabupaten Kuningan 4/2012 tentang Pengelolaan Zakat, Perda Kabupaten Lombok Barat 1/2012 tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah, Perda Kabupaten Garut 6/2014 tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Shadaqah, Perda Kota Serang 6/2014 tentang Pengelolaan Zakat, Perda Kabupaten Pangandaran 5/2015 tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Shadaqah, Perda Kabupaten Kayong Utara 5/2016 tentang Pengelolaan Zakat, Perda Kabupaten Indramayu 2/2016 tentang Pengelolaan Zakat, Perda Kabupaten Ciamis 13/2016 tentang Pengelolaan Zakat, Perda Kabupaten Batanghari 7/2016 tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah, Perda Kota Palembang 4/2017 tentang Pengelolaan Zakat dan Perda Kabupaten Lahat 2/2018 tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah

³ Program Pembentukan Perda menurut Pasal 1 Angka 13 Permendagri 80/2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis

swadaya masyarakat yang izinnnya diberikan oleh Kementerian Agama melalui rekomendasi BAZNAS (Yahya, 2020).

Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Zakat

Peraturan Daerah tentang pengelolaan zakat dimaksudkan agar zakat dapat dikelola dengan lebih baik, benar dan profesional. Peraturan juga berorientasi kepada perlindungan, pembinaan, bimbingan dan pelayanan serta pengawasan terhadap pengelolaan zakat sehingga tujuan dari Perda Zakat dapat berhasil dicapai dan tata kelolanya dapat dipertanggung jawabkan. Oleh karena itu, Perda yang telah disahkan masih memerlukan peraturan turunan lainnya untuk mengatur hal yang lebih teknis.

Berdasarkan praktik baik yang dilakukan pada kelima BAZNAS⁴, dapat dirumuskan 2 (dua) bentuk implementasi Perda Zakat, yaitu implementasi pada tingkat BAZNAS Kabupaten/Kota dan pada BAZNAS Provinsi.

Pertama, pada tingkat kabupaten dan kota, implementasi regulasi zakat di antaranya pada BAZNAS Kabupaten Cianjur sejak tahun 2004, melalui Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 09 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat, dan didukung oleh Peraturan Bupati Cianjur Nomor 01 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Zakat.

Selanjutnya, praktik serupa juga dilakukan oleh BAZNAS Kota Padang Panjang sejak tahun 2008, dengan terbitnya Perda Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Zakat, kemudian ditunjang oleh peraturan teknis yang dituangkan dalam Peraturan Wali Kota Padang Panjang Nomor 36 Tahun 2008. Hal serupa juga diikuti oleh Pemda Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) dengan menerbitkan regulasi zakat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah. Perda ini juga selanjutnya diimplementasikan secara lebih teknis dalam Peraturan Bupati Muba Nomor 37 Tahun 2019.

Sebagai contoh implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur dalam hal Zakat Fitrah dan Zakat Mal. Pembayaran Zakat Fitrah bagi kalangan ASN/TNI/Polri dapat dibayarkan melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada setiap kantor dinas, badan, lembaga, kantor/instansi, dan BUMD. Adapun, pembayaran zakat fitrah masyarakat umum dibayarkan melalui UPZ di DKM/RW/sekolah/madrasah. Pembayaran dilakukan dalam bentuk uang sesuai dengan nilai harga beras yang biasanya dikonsumsi oleh keluarga pembayar zakat.

Untuk zakat mal, nisabnya adalah penghasilan/gaji yang mencapai dan melebihi nilai 85 gram emas murni, dengan kadar zakatnya sebesar 2,5 persen. Zakat mal dibayarkan melalui UPZ di dinas, badan, lembaga, kantor/instansi, BUMD, dan kantor kecamatan, atau ke muzaki dapat langsung berkunjung ke BAZNAS Kabupaten baik setiap satu kali setahun atau dapat dilaksanakan setiap menerima penghasilan (gaji, honor tunjangan dan lainnya). Adapun penghitungan zakat mal dapat mengacu kepada tabel zakat yang tercantum dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat Dan Tata Cara

⁴ BAZNAS Provinsi NTB, BAZNAS Kabupaten Cianjur, BAZNAS Kabupaten Sukabumi, BAZNAS Kota Padang Panjang, dan BAZNAS Kabupaten Musi Banyuasin

Penghitungan Zakat Mal dan Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif, agar zakat yang ditunaikan melalui BAZNAS/UPZ sesuai dengan ketentuan syariah.

Praktik lainnya adalah pada Kabupaten Sukabumi, melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Zakat yang menegaskan peran dan fungsi BAZNAS Kabupaten Sukabumi yang bertanggung jawab dalam mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. Perda ini juga didukung oleh Peraturan Bupati, yaitu Perbub Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Infak Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya Berbasis Masyarakat.

Perda Zakat tersebut lebih lanjut diimplementasikan dalam 3 (tiga) bentuk Instruksi Bupati, yaitu Instruksi Bupati Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemungutan Zakat Infak Sedekah Penyedia Barang dan Jasa, Instruksi Bupati Nomor 4 Tahun 2016 tentang Optimalisasi Pemungutan Zakat Infak Sedekah dari Pegawai Negeri Sipil /ASN, dan Instruksi Bupati Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pemungutan Zakat Profesi dari Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) Pegawai Negeri Sipil/ASN.

Pada tataran praktis, implementasi Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten Sukabumi dilakukan melalui pemetaan potensi Muzaki dan Mustahik di setiap wilayah, kecamatan dan desa. Pemetaan diawali dengan pendataan potensi muzaki di tiap wilayah, kemudian dilanjutkan dengan pendataan potensi calon mustahiknya. Oleh karena itu, BAZNAS Kabupaten Sukabumi memberikan target kepada setiap UPZ Kecamatan dan dikawal dalam rapat koordinasi antara para petugas UPZ Kecamatan dan perangkat desa setiap enam bulan. Bagi UPZ yang mencapai target, BAZNAS menyediakan bantuan kendaraan operasional berupa motor kepada petugas UPZ tersebut.

Dalam hal pendistribusian dan pendayagunaan, BAZNAS Kabupaten Sukabumi mengimplementasikan dua pendekatan. Pendekatan pertama, yaitu melalui program unggulan, seperti program renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU). Adapun pendekatan kedua adalah program pemberdayaan yang bertujuan mempersiapkan *entrepreneur*/pengusaha-pengusaha baru yang didanai dari dana zakat infak sedekah.

Di antara bentuk pemberdayaan pengusaha baru adalah pendirian Z-Mart yang pada tahun 2020 telah berdiri 50 Z-Mart, maka tahun 2021 ini targetkan sebanyak 100 Z-Mart. Selain sebagai program pemberdayaan zakat, BAZNAS juga menitipkan kotak infak di setiap Z-Mart, yang rata-rata terhimpun dana antara 200-300 ribu rupiah per bulan. Selain itu, pemberdayaan juga dilakukan pada bidang usaha yang memiliki dampak yang lebih luas, seperti pada bidang pertanian.

Kedua, implementasi regulasi zakat pada level provinsi, sebagaimana yang telah tercantum pada Perda Provinsi NTB Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah. Adapun teknis penyelenggaraan pengelolaan zakat diatur dalam Peraturan Gubernur NTB Nomor 16 Tahun 2016. Kedua regulasi tersebut memiliki konten sistematis, terdiri dari tujuan pengelolaan zakat menurut syariat Islam, sebagai peraturan lebih lanjut dari UU Zakat, menjelaskan tentang kewenangan BAZNAS Provinsi NTB untuk menerima zakat serta menyalurkannya kepada mustahik di wilayah

Provinsi NTB, dan mekanisme pengawasan oleh pengawas eksternal yang dibentuk oleh Gubernur bersama masyarakat. Terbitnya kedua regulasi zakat ini sangat krusial dalam mendukung tata kelola zakat dan penguatan kelembagaan BAZNAS Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Berdasarkan kedua pola implementasi di atas, dapat disimpulkan bahwa regulasi zakat pada BAZNAS Provinsi NTB, BAZNAS Kabupaten Cianjur, BAZNAS Kota Padang Panjang, dan BAZNAS Kabupaten Musi Banyuasin, memiliki struktur regulasi yang serupa. Penataan sistem tata kelola regulasi zakat dimulai dari penerbitan Peraturan Daerah yang kemudian dijabarkan secara teknis melalui Peraturan Gubernur/Bupati/Wali Kota. Pola ini dapat digolongkan sebagai paket kebijakan dan regulasi zakat standar.

Adapun praktik yang lebih berkembang dan dinamis (*advanced*) dilakukan dengan menerbitkan regulasi tambahan untuk lebih menguatkan aspek tata kelola zakat pada BAZNAS Daerah yang belum diakomodasi pada peraturan zakat sebelumnya. Artinya, kendala atau kelemahan yang dimiliki BAZNAS Daerah didukung oleh pemerintah daerah dalam bentuk regulasi tambahan dengan tujuan memperkuat tugas dan memperluas fungsi BAZNAS Daerah.

Sebagai contoh adalah BAZNAS Kabupaten Sukabumi yang berkoordinasi dengan Bupati dalam memperluas jaringan muzaki dari kalangan Non-ASN melalui penerbitan Instruksi Bupati Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemungutan Zakat Infak Sedekah Penyedia Barang dan Jasa. Dengan surat Instruksi Bupati ini, BAZNAS Kabupaten Sukabumi dapat menambah jumlah muzaki sekaligus menambah pengumpulan dana zakat. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi regulasi zakat pada BAZNAS Kabupaten Sukabumi dijabarkan dalam bentuk yang lebih luas dan memiliki paket kebijakan dan regulasi yang lebih komplet.

Strategi paket kebijakan dan regulasi zakat yang *advanced* di atas dapat menjadi salah satu pilihan pendekatan dalam memperluas jangkauan objek zakat dan memperkuat BAZNAS untuk optimalisasi pengumpulan zakat tidak hanya dari ASN, tetapi juga kepada masyarakat luas. Hal ini menjadi penting karena berdasarkan fakta bahwa pengumpulan zakat di BAZNAS masih sangat dominan berasal dari zakat para ASN dan aparatur negara lainnya.

Faktor yang Memengaruhi Pelaksanaan Peraturan Zakat

Penerapan suatu kebijakan sangat bergantung pada faktor internal, yaitu kebijakan itu sendiri dan faktor eksternal yakni di mana kebijakan tersebut akan diimplementasikan. Menurut Grindle (2004) bahwa terdapat dua faktor yang berpengaruh terhadap implementasi sebuah kebijakan, yaitu isi kebijakan dan lingkungan implementasi.

Pertama, pada isi kebijakan terdapat enam variabel yang memengaruhi, yaitu cakupan kepentingan kelompok sasaran; tipe manfaat; derajat perubahan yang diinginkan; letak pengambilan keputusan; pelaksana program; dan sumber daya yang dilibatkan. Adapun faktor kedua, lingkungan implementasi terdiri atas tiga variabel antara lain: kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan penguasa, dan kepatuhan serta daya tanggap.

Pada aspek isi kebijakan, Perda Zakat disusun berdasarkan regulasi di atasnya, yaitu Undang Undang No. 23 Tahun 2011. Hal ini menjadikan konten Perda Zakat memenuhi standar tata kelola perzakatan di Indonesia.

Selain itu, pemenuhan standar isi kebijakan juga memengaruhi arah kebijakan yang jelas dari Perda Zakat untuk dapat diaplikasikan dalam pengelolaan zakat di daerah. Sebagai contoh, isi Perda Zakat No. 1 Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin memiliki kejelasan isi yang mengacu kepada regulasi zakat di tingkat nasional, yaitu meliputi aturan terkait subjek dan objek zakat, struktur dan pengurus organisasi pengelola zakat, tugas dan kewajiban yang berupa pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pelaporan dana zakat.

Selain itu, Perda Zakat tersebut juga mengatur pengelolaan dana keagamaan selain zakat seperti infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pada bagian akhir Perda Zakat dijelaskan pembinaan dan pengawasan, peran serta masyarakat, serta larangan praktik pengumpulan dana zakat secara ilegal berikut dengan sanksinya. Pemenuhan standar isi kebijakan dalam Perda Zakat ini tentunya menjadikan regulasi ini dapat dipahami secara jelas dan tentunya memudahkan dalam implementasinya.

Adapun pada aspek pembentukan lingkungan kebijakan, Perda Zakat didukung oleh peraturan lainnya yang diterbitkan oleh kepada daerah. Peraturan kepada daerah dapat berupa Peraturan Gubernur, Peraturan Wali Kota, Peraturan dan Instruksi Bupati, serta peraturan lainnya yang lebih bersifat teknis pelaksanaan dari Perda Zakat. Selain itu, peraturan turunan juga berperan menjelaskan dan mempersiapkan subjek dan objek zakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Peraturan turunan yang secara langsung berhubungan dengan subjek dan objek zakat adalah penetapan zakat fitrah yang ditetapkan Bupati Cianjur yang dijadikan salah satu rujukan bagi ANS/POLRI/TNI dan masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakat fitrah sesuai dengan nilai dan waktu yang sudah ditentukan. Adapun aturan pendukung yang bersifat tidak langsung seperti Instruksi Bupati Sukabumi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Majelis Taklim aparatur, di mana seluruh ASN di Kabupaten Sukabumi diwajibkan untuk mengikuti pengajian pada setiap hari Senin selama satu jam yang diisi oleh para ustaz Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Materi yang disampaikan difokuskan kepada topik ibadah zakat dan pengelolaan zakat. Instruksi Bupati ini menjadi landasan bagi BAZNAS untuk bekerja sama dengan MUI dalam penyusunan jadwal penceramah dan materi kajian terkait zakat yang disampaikan kepada para jemaah di setiap kantor instansi pemerintah daerah. Dengan demikian, pemahaman dan kesadaran para jemaah dapat dibangun dan ditingkatkan sehingga kebijakan zakat dapat diaplikasikan dengan lebih mudah karena didukung oleh strategi pemangku kebijakan yang bersifat strategis dan solutif.

Selain faktor pendukung keberhasilan implementasi Perda Zakat di atas, terdapat pula faktor yang menjadi penghambat atau tantangan yang perlu diperhatikan seperti ketersediaan sumber daya manusia (amil) beserta kompetensinya. Hal ini menjadi kendala hampir diseluruh BAZNAS Daerah, sebagai contoh di BAZNAS Kabupaten Cianjur yang

mengungkapkan keterbatasan SDM sebagai unsur penggerak utama yang menjadi rujukan atau uswah (keteladanan) sehingga mampu menyentuh seluruh lapisan masyarakat, khususnya dalam sosialisasi dan edukasi praktik zakat.

Keterbatasan ini juga semakin menjadi tantangan melihat kondisi geografis dan wilayah Kabupaten Cianjur yang luas meliputi 32 Kecamatan yang sebagian besar atau 60 persen berada di lokasi yang sangat jauh dari pusat kota dengan waktu tempuh antara 5-6 jam perjalanan darat. Oleh karena itu, masih banyak para muzaki yang jauh dari jangkauan BAZNAS. Mereka menyalurkan zakat secara mandiri dan langsung di daerahnya tanpa difasilitasi oleh organisasi pengelola zakat.

Tantangan selanjutnya adalah ketersediaan jaringan dalam bersinergi. BAZNAS sebagai LPNS secara otomatis memiliki jaringan antarinstansi pemerintah daerah, seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, TNI, Polri dan MUI serta pemerintah pada level kecamatan dan desa. Jaringan ini kemudian menjadi modal utama dalam segala aktivitas BAZNAS Daerah baik dalam hal pengumpulan dan pendistribusian dana zakat.

Namun, BAZNAS Daerah masih memiliki tantangan membangun dan membina jaringan di luar instansi pemerintah daerah, seperti perbankan, perusahaan swasta, pengusaha, tokoh masyarakat dan lembaga amal zakat yang didirikan oleh masyarakat. Keterbatasan dalam jaringan non-pemerintah inilah yang kemudian menjadi penghambat implementasi Perda Zakat pada masing-masing wilayah BAZNAS.

DAMPAK REGULASI ZAKAT DAERAH TERHADAP KINERJA PENGUMPULAN BAZNAS

Berdasarkan laporan BAZNAS diperkirakan potensi zakat mencapai angka Rp327,6 Triliun di tahun 2020. Namun, realisasi pengumpulan zakat pada OPZ baru mencapai Rp71,4 Triliun atau sekitar 21,7 persen (Puskas BAZNAS, 2020). Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa hal di antaranya adalah masyarakat belum sepenuhnya percaya kepada BAZNAS sebagai institusi pengelola zakat nasional.

Selain itu, kesenjangan antara potensi dan realisasi juga disebabkan oleh tingkat literasi zakat sebagian besar umat Muslim, khususnya dalam penghitungan zakat dan kepada siapa seharusnya zakat dibayarkan (Mubarak & Baihaqi, 2014: 7). Kedua hal di atas menjadikan tantangan utama dalam pengumpulan zakat oleh BAZNAS dan OPZ lainnya.

Strategi pengumpulan zakat merupakan bagian inti dari regulasi zakat. Mekanisme pengumpulan zakat yang jelas dan tegas merupakan pendorong optimalisasi daya himpun dana zakat (Atabik, 2015: 51). Dalam Al-Qur'an Allah Subhanallahu Wa Ta'ala berfirman: "Ambilah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menucikan mereka, ..." (QS. 9:103).

Ayat di atas merupakan perintah Allah Subhanallahu Wa Ta'ala kepada Rasulullah Shallahu 'Alaihi Wasallam sebagai pemimpin umat Muslim, untuk mengambil zakat dari harta mereka. Artinya, zakat itu diambil, dipungut, ditagih dan bukan ditunggu. Dengan kata lain pengumpulan zakat merupakan tugas yang menuntut peran aktif dari pemimpin umat, dalam konteks Indonesia diwujudkan dalam bentuk lembaga BAZNAS.

Oleh karena itu, regulasi zakat tidak hanya menjadikan BAZNAS sebagai lembaga resmi negara urusan zakat, tetapi juga memberikan legalitas kepada BAZNAS untuk dapat berperan aktif dalam pengumpulan dana zakat dengan mengambil, memungut dan menagih dari setiap masyarakat wajib zakat. Apabila pengumpulan dana zakat optimal, maka penyaluran dana zakat dapat lebih optimal sehingga manfaat yang diterima oleh golongan penerima zakat akan semakin maksimal.

Peran BAZNAS sangat penting dalam pengumpulan dana zakat. Lebih dari itu, secara filosofis, BAZNAS memiliki tugas mulia dalam membantu umat Islam untuk menunaikan kewajiban membayar zakat sehingga mereka dapat selamat dari hukuman di dunia maupun di akhirat. Berdasarkan diskusi kelompok terarah (FGD) bersama lima BAZNAS Daerah pilihan, terdapat beberapa hal positif dan signifikan terutama pada aspek pengumpulan zakat. Berikut strategi yang dilakukan lima BAZNAS terkait untuk meningkatkannya.

BAZNAS Provinsi Nusa Tenggara Barat

Melalui penerbitan regulasi zakat di daerah, BAZNAS Daerah mendapatkan dukungan legalitas formal dalam memungut zakat. Bahkan dukungan ini akan semakin maksimal jika ditunjang oleh peraturan lainnya yang lebih teknis. Seperti yang terjadi pada BAZNAS Provinsi NTB, yaitu dengan penerbitan Pergub NTB Nomor 15 tahun 2016 terbukti menambah kekuatan BAZNAS NTB dalam pengumpulan zakat, infak dan sedekah. Dalam Pergub tersebut, pada Bab 2 nomor 10, diatur regulasi terkait pembayaran zakat dari PNS, non-PNS, BUMD, tunjangan kerja, profesi dokter, pengacara, akuntan, dan lain-lain. Melalui Pergub ini dapat ditemukan klausul yang menguatkan BAZNAS NTB dalam pemungutan zakat dari muzaki di luar ASN.

Dampak positif lainnya dari regulasi zakat daerah adalah legalitas kelembagaan. Dengan legalitas pendirian maka BAZNAS dapat mengakses layanan lembaga keuangan, seperti perbankan dengan menggunakan rekening sebagai alat pengumpulan zakat. Selain itu, BAZNAS NTB juga memiliki legalitas untuk melakukan kerja sama dengan bank-bank besar untuk memudahkan pengumpulan zakat. Legalitas ini juga dimanfaatkan oleh BAZNAS NTB untuk pengembangan jaringan, yaitu dengan platform penyedia layanan donasi untuk melakukan kampanye beberapa program pengumpulan.

Gambar 3.1 Pengumpulan BAZNAS Provinsi NTB Tahun 2020 dan 2019 dalam Miliar Rupiah

Sumber: Sistem Manajemen Informasi BAZNAS (SIMBA) & FGD BAZNAS Provinsi NTB: 2021

Gambar di atas menyajikan pengumpulan dana zakat oleh BAZNAS Provinsi NTB selama 5 tahun terakhir (2015-2020). Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat peningkatan jumlah pengumpulan zakat yang signifikan setelah Pergub NTB Nomor 15 tahun 2016 dikeluarkan. Khususnya antara tahun 2016 dan 2017 yang mengalami peningkatan sebesar

102 persen. Hal ini membuktikan dampak positif dari Pergub NTB terhadap kinerja pengumpulan zakat di BAZNAS Provinsi NTB.

Meskipun demikian, pengumpulan tersebut masih didominasi muzaki dari golongan ASN dan belum mencerminkan realisasi zakat dari masyarakat luas. Hal ini, menurut BAZNAS Provinsi NTB, disebabkan masih rendahnya sosialisasi tentang pengumpulan dana ZIS di BAZNAS NTB. Selain itu, masyarakat masih cenderung memilih untuk menyalurkan ZIS secara pribadi kepada lingkungan sekitarnya.

BAZNAS Kabupaten Cianjur

Legalitas BAZNAS Kabupaten Cianjur terbentuk melalui Perda Kabupaten Cianjur Nomor 09 tahun 2004. Selanjutnya, Perda tersebut ditunjang dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 1 Tahun 2010 tentang petunjuk pelaksanaan Perda tentang Pengelolaan Zakat. Perbub ini menguatkan peran dan pelaksanaan pengumpulan dana zakat oleh BAZNAS dan UPZ di level kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan. Dengan kedua regulasi zakat tersebut, BAZNAS Kabupaten Cianjur dapat melakukan aktivitas pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah secara legal, khususnya di wilayah Kabupaten Sukabumi. Namun demikian, peraturan di atas dapat dinilai hanya sebatas pengenalan BAZNAS sebagai pengelola zakat dan perannya di masyarakat. Belum menyentuh pada kebijakan pemotongan penghasilan ASN dan aparatur daerah lainnya untuk keperluan pembayaran zakat. Sehingga dampak regulasi ini belum terlalu signifikan. Hal ini dapat dipahami mengingat bahwa kedua regulasi zakat di atas diterbitkan pada tahun 2004 dan 2010, dan masih mengacu kepada UU Zakat yang lama, No. 38 Tahun 1999 dan belum diperbaharui untuk mengacu kepada UU Zakat terbaru, UU No. 23 Tahun 2011. Hal ini membuat BAZNAS Kabupaten Cianjur bekerja lebih ekstra tidak hanya untuk menghimpun dana zakat dari masyarakat, tetapi juga mengupayakan penerbitan regulasi terkini terkait pengelolaan zakat daerah.

Namun demikian, di samping tantangan pembaharuan regulasi zakat daerah, BAZNAS Kabupaten Cianjur memaksimalkan perannya sebagai lembaga zakat resmi daerah melalui beberapa program pengumpulan seperti pelayanan zakat melalui m-banking, layanan jemput zakat, pembentukan UPZ setiap kecamatan, dan penggunaan platform *fundraising online* seperti: Kitabisa, Shopee, dan Tokopedia. Program ini juga didukung dengan beberapa kegiatan sosialisasi dan kampanye zakat dalam bentuk bedah buku, kajian ilmiah, seminar tematik, Bahtsul Masail Fiqh Zakat, dan ajakan berzakat melalui media cetak berupa Spanduk, Pamflet, Brosur, *Newsletter*, *Banner* disertai dengan *media online* (Media Sosial) seperti Facebook, Instagram, Website, Youtube BAZNAS, dan *WA Centre* BAZNAS. Selain itu, BAZNAS Kabupaten Cianjur juga mengupayakan koordinasi pelaksanaan pengumpulan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) melalui kerja sama dengan berbagai instansi di Pemerintah daerah Kabupaten Cianjur dan perusahaan swasta yang memiliki banyak karyawan. Sebagai gambaran upaya pengumpulan dana ZIS yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Cianjur dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 3. 2 Pengumpulan BAZNAS Kabupaten Cianjur Tahun 2020 dan 2019 dalam Rupiah

Sumber: Sistem Manajemen Informasi BAZNAS (SiMBA) & FGD BAZNAS Kabupaten Cianjur: 2021

Berdasarkan data penerimaan ZIS di atas, dapat dilihat bahwa mayoritas dana yang dikumpulkan oleh BAZNAS Kabupaten Cianjur berupa zakat fitrah dengan rata-rata pengumpulan di sekitar angka Rp12 Miliar. Adapun jumlah pengumpulan zakat mal perorangan menunjukkan jumlah rata-rata Rp3,5 Miliar. Jumlah tersebut merupakan nominal yang cukup signifikan, khususnya bagi BAZNAS Kabupaten Cianjur yang belum memiliki regulasi zakat yang mengambil zakat dari potongan gaji pegawai ASN. Selain itu, kendala pengumpulan dana zakat juga disebabkan masih banyak para muzaki dari kalangan ASN, aparatur negara, serta masyarakat luas yang menyalurkan ZIS secara mandiri. Hal ini dilatarbelakangi oleh persepsi masyarakat yang belum melihat pentingnya membayar zakat melalui lembaga zakat seperti BAZNAS.

BAZNAS Kota Padang Panjang

Penguatan tata kelola zakat di Kota Padang Panjang dituangkan pada Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2008, yang kemudian diimplementasikan secara teknis melalui Peraturan Wali Kota Padang Panjang Nomor 36 Tahun 2008. Kedua regulasi di atas berfungsi menguatkan tata kelola BAZNAS Kota Padang Panjang, khususnya dalam melakukan pengumpulan dana ZIS dari masyarakat Kota Padang Panjang. Namun demikian, regulasi tersebut masih memerlukan penguatan lebih lanjut dalam hal kebijakan pemotongan zakat dari gaji para pegawai ASN dan pegawai swasta yang termasuk dalam kategori wajib zakat. Hal ini dapat dipahami karena regulasi zakat saat ini yang digunakan oleh BAZNAS Kota Padang Panjang masih mengacu kepada UU Zakat No. 38 Tahun 1999 dan belum disesuaikan dengan UU Zakat No. 23 Tahun 2011.

Adapun jumlah pengumpulan dana zakat di BAZNAS Kota Padang Panjang dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 3. 3 Pengumpulan BAZNAS Kota Padang Panjang Tahun 2020 dan 2019 dalam Rupiah

Sumber: Sistem Manajemen Informasi BAZNAS (SiMBA) & FGD BAZNAS Kota Padang Panjang: 2021

Berdasarkan data pengumpulan zakat di atas dapat dilihat bahwa rata-rata jumlah dana zakat yang dikumpulkan oleh BAZNAS Kota Padang Panjang adalah sekitar Rp0,83 Miliar. Jumlah ini dapat tergolong angka yang rasional mengingat secara administratif pemerintahan Kota Padang Panjang hanya terdiri atas 2 (dua) kecamatan dengan populasi 56.311 jiwa (Sensus, 2020) dan luas area 23 km persegi. Selain itu, struktur masyarakat di Kota Padang Panjang adalah penduduk migran atau pendatang (pengusaha) yang mayoritas masih membayarkan zakatnya di daerah asal mereka.

Meskipun demikian, terdapat tren peningkatan jumlah pengumpulan zakat yang sangat signifikan dari tahun 2019 ke tahun 2020, yaitu kenaikan sebesar 160 persen. Hal ini menunjukkan upaya kerja keras dari BAZNAS Kota Padang Panjang dalam sosialisasi dan dakwah melalui para penyuluh agama tentang pentingnya ibadah zakat di Kota Padang Panjang telah mulai memperlihatkan hasil yang positif. Upaya dan inovasi ini tentunya tidak terlepas dari dukungan dan penguatan kelembagaan yang diberikan oleh pemerintah kota kepada BAZNAS Kota Padang Panjang.

BAZNAS Kabupaten Musi Banyuasin

Kabupaten Musi Banyuasin termasuk daerah yang baru memiliki Perda Zakat. Hal ini dapat terwujud atas upaya yang dilakukan oleh BAZNAS Musi Banyuasin melalui pendekatan dan komunikasi intensif kepada pihak esekutif maupun legislatif. Perda Zakat ini disetujui oleh DPRD Komisi III dan diundangkan secara resmi pada tanggal 25 Maret 2019 dengan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah. Produk regulasi zakat yang baru disahkan ini langsung diimplementasikan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dengan menerbitkan Peraturan Bupati No. 37 Tahun 2019 yang ditandatangani pada tanggal 4 April 2019, yang intinya memuat kebijakan pemotongan zakat 2,5% dari penghasilan bruto para ASN di lingkungan Pemda Kabupaten Musi Banyuasin. Implementasi

kebijakan pada Perda Zakat kepada Peraturan Bupati tentang zakat dilaksanakan pada tempo yang sangat singkat yaitu kurang dari sepuluh hari. Hal ini menunjukkan bukti dukungan penuh dari segala pihak, khususnya dari kepala daerah kepada BAZNAS Kabupaten Musi Banyuasin.

Setelah penerbitan kedua regulasi zakat tersebut di atas, agenda sosialisai dilakukan oleh pihak eksekutif yaitu Sekretaris Daerah kepada seluruh pejabat daerah yang tergabung dalam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) beserta bendahara instansinya di Dinas Pendapatan dan Keuangan daerah. Pada sosialisasi tersebut disampaikan bahwa implementasi Perda Zakat dan Perbup Zakat akan dimulai pada bulan Mei 2019. Artinya, satu bulan sejak regulasi zakat disahkan, seluruh OPD diperintahkan untuk segera membentuk UPZ (unit penghimpun zakat) dan mulai melakukan penarikan zakat sebesar 2,5% dipotong dari gaji maupun tunjangan para ASN sebagaimana yang diatur pada Perda dan Perbup Zakat. Adapun bagi ASN yang belum mencapai nisab wajib zakat, maka mereka diminta untuk membuat surat pernyataan tidak wajib zakat dan diwajibkan untuk menunaikan infak dari gaji dan tunjangan yang didapat.

Penerbitan Perda dan Perbup tentang zakat ini sangat berdampak positif bagi kinerja BAZNAS Kabupaten Musi Banyuasin, khususnya pada bidang pengumpulan dana zakat. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan yang sangat signifikan dari jumlah pengumpulan sebelum dan setelah regulasi zakat diberlakukan. Sebelum adanya regulasi zakat dana zakat yang terkumpul dari seluruh OPD rata-rata sebesar Rp60 juta per-bulan.

Adapun setelah pemberlakuan regulasi tersebut pada awal bulan Mei total pengumpulan mencapai rata-rata Rp600 juta per bulan, atau naik sekitar 1.000 persen. Jumlah pengumpulan terus bertambah mencapai rata-rata Rp700 juta per bulan pada bulan Juni 2019, kemudian berlanjut sampai tahun 2021. Jadi, jika dibandingkan dengan rata-rata pengumpulan pada masa sebelum regulasi zakat sampai tahun 2021, telah terjadi peningkatan pengumpulan dana ZIS sebesar lebih dari sepuluh kali lipat.

Meskipun terdapat peningkatan yang sangat signifikan, BAZNAS Kabupaten Musi Banyuasin masih menghadapi tantangan rendahnya partisipasi masyarakat selain ASN dalam pembayaran zakat di BAZNAS Kabupaten Musi Banyuasin. Sebagai contoh masih banyak masjid yang tidak bersedia untuk menginformasikan jumlah dana ZIS yang dikumpulkan. Selanjutnya, masih ada kesan yang menunjukkan kurangnya kesadaran individu, masyarakat maupun pemerintah untuk melakukan sinergi dalam pengelolaan zakat.

Gambar 3. 4 Pengumpulan BAZNAS Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 dan 2019 dalam Rupiah
Sumber: Sistem Manajemen Informasi BAZNAS (SiMBA) & FGD BAZNAS Kabupaten Musi Banyuasin: 2021

BAZNAS Kabupaten Sukabumi

Implementasi regulasi zakat di Kabupaten Sukabumi dimulai dari penerbitan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengelolaan Zakat yang kemudian pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016. Selanjutnya, dikeluarkan Instruksi Bupati Nomor 1 tahun 2016 tentang pemungutan zakat infak sedekah bagi para penyedia barang dan jasa di Kabupaten Sukabumi, serta para pemborong yang menerima pekerjaan dari Pemerintah Kabupaten Sukabumi diwajibkan untuk membayar zakat kepada BAZNAS Kabupaten Sukabumi. Tidak hanya itu, Bupati juga mengeluarkan Instruksi Bupati Nomor 4 tahun 2016 tentang Optimalisasi Pemungutan Zakat, Infak dan sedekah dari Pegawai Negeri Sipil atau ASN di Kabupaten Sukabumi. Pembayaran ZIS dilakukan secara *payroll system* dengan memberikan surat kuasa untuk memotong gaji dari yang diterima oleh pihak pegawai. Pemotongan penghasilan untuk zakat langsung dilakukan di bank sebagai pembayaran gaji atau Kas daerah. Selain itu, Bupati juga mengeluarkan tambahan kebijakan dalam Instruksi Bupati Nomor 11 tahun 2018 untuk pemungutan zakat profesi dari tunjangan kinerja daerah. Serangkaian kebijakan yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Sukabumi mencerminkan bentuk dukungan yang luar biasa kepada BAZNAS Daerah, dalam hal ini BAZNAS Kabupaten Sukabumi.

Dengan dukungan penuh di atas, maka dapat dipahami bahwa mayoritas jumlah dana pengumpulan dana ZIS berasal dari para ASN di Kabupaten Sukabumi yaitu mencapai 77 persen. Dengan kata lain, pengumpulan dari masyarakat luas seperti pengusaha, petani, dan pegawai perusahaan swasta masih belum maksimal. Adapun porsi pengumpulan dana ZIS pada BAZNAS Kabupaten Sukabumi dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 3. 5 Pengumpulan BAZNAS Kabupaten Sukabumi Tahun 2020 dan 2019 dalam Rupiah
Sumber: Sistem Manajemen Informasi BAZNAS (SiMBA) & FGD BAZNAS Kabupaten Sukabumi: 2021

Dari penjelasan dan penggambaran di atas, dapat disimpulkan bahwa adanya peraturan pengelolaan zakat berdampak secara langsung terhadap pengumpulan zakat BAZNAS Provinsi dan Kabupaten/Kota. Tingginya pengumpulan tersebut salah satunya disebabkan oleh salah satu sektor zakat potensial, yaitu zakat pendapatan dan jasa dari muzaki Apartatur Sipil Negara (ASN), meliputi: kementerian/lembaga, TNI, Polri, BUMN/BUMD, BI, OJK, dan DPR/DPRD.

Dalam konsep tanggung jawab bernegara, muzaki-muzaki tersebut merupakan garda terdepan yang harus melakukan upaya-upaya untuk membangun negara termasuk dengan menunaikan kewajiban zakatnya sekaligus memberi keteladanan kepada masyarakat muslim tentang kewajiban zakat. Dengan mengoptimalkan zakat pendapatan dan jasa dari muzaki di kementerian/lembaga, TNI, Polri, BUMN/BUMD, BI, OJK, dan DPR/DPRD diharapkan mampu membangun sikap gotong royong antarumat bernegara.

Menurut data Badan Kepegawaian Negara, jumlah aparatur sipil negara pada tahun 2020 sebanyak 4.121.176 jiwa. Jumlah ini sekitar 2,98 persen dari total jumlah angkatan kerja penduduk Indonesia yang sebanyak 138.220.000 jiwa. Jika ditambah dengan jumlah TNI, Polri, pegawai BUMN/BUMD, BI, OJK, dan DPR/DPRD, maka jumlah total aparatur tersebut sebanyak 6.263.127 atau 4,53 persen dari jumlah angkatan kerja penduduk Indonesia.

Dalam kerangka perzakatan, potensi zakat pendapatan dan jasa dari sektor pemerintah yang terdiri atas muzaki ASN terbukti memiliki potensi yang besar. Hal ini dibuktikan dengan realisasi pengumpulan zakat pendapatan dan jasa di sektor tersebut pada kelima BAZNAS Provinsi dan Kabupaten/Kota meningkat jika dibandingkan dengan pengumpulan sebelum adanya regulasi potong zakat.

Seluruh pegawai negeri sipil di lima daerah objek penelitian telah membayar zakat melalui BAZNAS dengan *payroll system*. *Payroll system* melalui surat kuasa pemotongan gaji yang diterima pegawai ASN dengan pemotongan langsung oleh bank sebagai pembayaran gaji atau kas daerah.

Gambar 3. 6 Dampak Regulasi Zakat Daerah terhadap Pengumpulan Zakat ASN & Non-ASN

Pemetaan Dalam Perhimpunan Dana Zakat

Aktivitas dalam mengumpulkan zakat adalah sebuah aktivitas yang mulia karena aktivitas tersebut sebagai ujung tombak bisa terlaksananya kewajiban yang *fardhu ain* bagi kaum Muslimin yang telah mencapai nisab dan haul dari harta yang dimilikinya. Meskipun zakat adalah ibadah wajib setelah salat, tetapi tingkat kesadaran dalam membayar zakat umat Muslim negeri ini masih jauh dari harapan. Bahkan tidak sedikit golongan dari kaum Muslimin yang tidak menganggap pentingnya menghitung zakat dari harta yang mereka miliki. Hal ini menjadi sesuatu yang sangat mengkhawatirkan dari aspek keislaman seseorang.

Upaya dakwah zakat dalam bentuk edukasi dan sosialisai telah dan akan terus dilakukan oleh OPZ baik BAZNAS maupun LAZ. Sosialisasi dan edukasi dilakukan melalui berbagai jenis media seperti media sosial ataupun teknologi informasi yang lebih canggih seperti video-video singkat, drama singkat dan ilustrasi dalam bentuk cerita yang berasal dari Hadits Rasulullah Shallahu 'Alahi Wasallam. Serangkaian program dan usaha ini dimaksudkan untuk membangkitkan kesadaran dan memberikan pencerahan terhadap masyarakat Muslim dalam menjalankan ibadah maliyah (harta).

Selain aspek edukasi dan sosialisasi di atas, peningkatan pengumpulan dana zakat juga perlu pemetaan potensi dan wilayah. Pemetaan potensi dimulai dengan pendataan masyarakat kategori pendapatan menengah ke atas atau layak dimasukkan pada golongan

muzaki dan pendataan masyarakat berpendapatan rendah, kategori fakir dan miskin, dan potensi keberadaan golongan penerima zakat lainnya yang terdapat di setiap wilayah kerja BAZNAS. Hal ini sangat penting mengingat fungsi keberadaan BAZNAS adalah sebagai penanggung jawab dalam pengambilan dan penyaluran zakat di wilayahnya.

Pemetaan ini juga sangat krusial untuk memaksimalkan tata kelola zakat yang teratur dan terkoordinasi, baik dalam pengumpulan maupun penyaluran. Dalam pengumpulan zakat dari ASN, BAZNAS bekerja sama dengan lembaga dan instansi pemerintah daerah untuk pembentukan UPZ di masing-masing kantor. Namun, dalam pengumpulan zakat dari masyarakat umum, BAZNAS akan bersinggungan dengan pihak yang lebih luas dan bervariasi mulai dari aparat pemerintah pada level kecamatan, kelurahan/desa, hingga LAZ yang dibentuk oleh masyarakat.

Apabila tidak dilakukan pemetaan dan pengaturan, yang akan terjadi bukan hubungan saling membantu antarlembaga di atas, khususnya BAZNAS dan LAZ, melainkan akan terjadi persaingan antarlembaga zakat dan kerancuan data muzaki dan mustahik. Hal tersebut tentunya tidak sejalan dengan semangat tata kelola zakat yang dicita-citakan dalam regulasi zakat nasional dan daerah, serta tidak sesuai dengan semangat tolong-menolong dalam kebaikan dan ketaatan sebagaimana perintah Allah Subhanallahu Wata'ala "...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, ..." (QS. Al-Maidah: 2).

Organisasi Pengelola Zakat, BAZNAS dan LAZ, akan mendapatkan sedikitnya dua manfaat dari adanya pemetaan potensi dan wilayah, yaitu pemetaan berfungsi sebagai filter jumlah potensial muzaki yang telah memenuhi persyaratan. Selain itu, pemetaan juga berfungsi sebagai acuan kerja dan evaluasi kinerja.

1. Pemetaan sebagai Filter Muzaki

Berdasarkan FGD bersama kelima BAZNAS Daerah dapat disimpulkan dua cara menjaring muzaki, khususnya dari kalangan ASN. Pertama, seleksi muzaki berdasarkan data gaji dan penghasilan ASN, yang menggunakan acuan nisab zakat penghasilan atau zakat profesi. Setiap ASN yang telah melebihi batas minimal penghasilan wajib zakat akan dikenakan kebijakan potong zakat dari penghasilan. Bagi ASN yang mengalami kendala finansial dapat mengajukan keberatan melalui surat pernyataan untuk kemudian dipelajari dan dipertimbangkan oleh tim BAZNAS. Pola ini diimplementasikan pada BAZNAS Daerah yang telah memiliki kebijakan pemotongan zakat dari penghasilan. Kedua, penjaringan muzaki melalui survei dengan menyebarkan angket kesediaan membayar zakat melalui BAZNAS yang disebar oleh masing-masing UPZ di setiap kantor instansi pemerintah daerah. Cara ini merupakan pendekatan sukarela, yang diaplikasikan pada BAZNAS yang belum memiliki regulasi zakat yang mewajibkan ASN membayar zakat melalui BAZNAS.

Secara infrastruktur, BAZNAS sebagai lembaga pemerintah memiliki jaringan yang ideal untuk melakukan pemetaan muzaki dan mustahik. Dalam pemetaan muzaki, BAZNAS memiliki akses kepada Badan Kepegawaian Daerah yang mengelola keuangan gaji ASN. Adapun untuk muzaki non ASN, BAZNAS memiliki akses koordinasi dengan pemerintah pada tingkat kecamatan dan desa/kelurahan untuk melakukan pendataan calon muzaki maupun mustahik.

2. Pemetaan sebagai Evaluasi Kinerja

Pemetaan akan memiliki keluaran (output) berupa data muzaki dan mustahik yang dapat dijadikan acuan dalam perencanaan, *targeting*, pembagian tugas, dan evaluasi. Sebagai contoh, dengan ketersediaan data muzaki, BAZNAS dapat melihat berapa SDM yang dibutuhkan dalam memungut zakat dari jumlah muzaki yang ada. Dengan kata lain, BAZNAS dapat mengukur kemampuan seorang amil zakat dalam menjalankan pengelolaan pengumpulan zakat yang ideal dan maksimal untuk satu institusi/kantor bahkan untuk satu wilayah kecamatan/desa. Dengan evaluasi berbasis pemetaan dan data ini akan terwujud kinerja yang efisien dan terukur.

Selain itu, pemetaan juga dapat menjadi dasar evaluasi kebijakan. Sebagai contoh dalam melaksanakan perhimpunan zakat dari ASN, BAZNAS untuk melihat capaian pemungutan setiap UPZ di masing-masing institusi dan membandingkannya dengan data potensi muzaki. Dengan demikian, BAZNAS akan mudah mengidentifikasi permasalahan rendahnya partisipasi muzaki pada suatu instansi atau wilayah sehingga dapat merumuskan solusi sebagai dasar pengambilan kebijakan selanjutnya.

DAMPAK REGULASI ZAKAT DAERAH TERHADAP KINERJA PENYALURAN BAZNAS

Tujuan mendasar ibadah zakat adalah untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan sosial seperti pengangguran, kemiskinan, dan lain-lain (Beik, 2009: 3). Sistem distribusi zakat merupakan solusi terhadap persoalan-persoalan tersebut dengan memberikan bantuan kepada orang miskin tanpa memandang ras, warna kulit, etnis, dan atribut-atribut keduniawian lainnya. Zakat tidak sekadar sebagai sebuah kewajiban, tetapi lebih dari itu, zakat dikelola dengan baik dan didistribusikan secara merata hingga sampai ke tangan yang berhak dari orang yang kaya kepada yang miskin (Mansur: 2008: 47).

Zakat merupakan fondasi agama Islam, selain merupakan kewajiban mutlak bagi seorang muslim, zakat juga merupakan instrumen kunci dalam menumbuhkan dan meningkatkan perekonomian umat, dengan peran besarnya yang mampu menjadi alat distribusi kesejahteraan umat (Nurhasanah & Suryani, 2018: 186).

Secara syariat, zakat disalurkan kepada golongan yang telah ditentukan, yaitu terangkum dalam 8 (delapan) golongan. Mereka adalah yang disebut dengan mustahik sebagaimana yang tercantum di dalam Al-qur'an yang artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat (amil), para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan budak), orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi mahabijaksana" (QS. At-Taubah: 60).

Dalam konteks negara, ayat di atas menunjukkan bahwa zakat adalah instrumen pendapatan nasional yang penggunaannya untuk menyejahterakan masyarakat lokal maupun nasional dalam bentuk pembiayaan dan pemenuhan keperluan pembangunan. Di masa Rasulullah Shallahu 'Alaihi Wasallam dan Khulafa'ur Rasyidin, zakat diwajibkan bagi umat Muslim yang kaya dengan ketentuan sudah mencapai nisab dan haul. Jika para wajib zakat menolak untuk membayar zakat maka mereka diperangi oleh pemimpin negara. Hal ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya pemungutan zakat dari orang kaya untuk kemudian didistribusikan kepada golongan yang berhak menerima zakat sebagai wujud jaminan sosial dan kesejahteraan warga negara yang kurang mampu.

Pendistribusian zakat yang dilakukan oleh amil tidak serta-merta berjalan begitu saja, melainkan dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang ada serta dukungan peraturan pemerintah sebagai pemegang kebijakan. Pada masa Rasulullah Shallahu 'Alaihi Wasallam misalnya, pendistribusian zakat dilakukan sampai kepada golongan budak (hamba sahaya), di samping kelompok fakir miskin. Prioritas pendistribusian kepada golongan hamba sahaya diperuntukkan untuk menebus dan memerdekakan mereka sehingga tidak ada lagi perbudakan yang hanya mengeksploitasi hak kebebasan individu manusia.

Berbeda pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yang mana saat itu pendistribusian zakat sampai ke luar wilayah di mana zakat itu dipungut karena tidak adanya mustahik di daerah tersebut. Lebih dari itu, zakat bahkan didistribusikan ke luar wilayah Islam pada masa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Mayoritas umat Muslim ketika itu termasuk dalam golongan muzaki, kebutuhan dasar terpenuhi dan hidup sejahtera. Keadaan ini menjadikan petugas zakat kala itu kesulitan untuk mencari seseorang yang bersedia untuk menerima zakat. Akhirnya dana zakat yang terkumpul disalurkan hingga ke luar negeri untuk diberikan kepada golongan fakir dan miskin. Hal di atas menunjukkan bahwa kebijakan penyaluran dana zakat sangat terikat dengan kondisi lingkungan dan pemimpin wilayah sebagai pemegang kebijakan dan tanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya.

Dana yang terkumpul melalui zakat sangat potensial sebagai sarana jaminan sosial berupa bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Sementara Negara Indonesia merupakan Negara Kesejahteraan yang mempunyai tanggung jawab dan kewajiban untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat atau mengurus agar masyarakat sejahtera.

Dalam rangka menciptakan kesejahteraan tersebut, maka pemerintah mempunyai wewenang diantaranya membuat pengaturan tentang zakat dalam membuat undang-undang zakat dengan peraturan pelaksanaannya. Berkaitan dengan hal ini, maka pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat (Januardi, 2018: 11). Sehingga zakat sebagai kewajiban umat Islam memiliki dasar hukum yang kuat.

Undang-undang tentang pengelolaan zakat tersebut memberikan implikasi luas lembaga pengelolaannya. Pengelolaan zakat secara umum mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatannya berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahik dan untuk usaha produktif. Untuk mewujudkan optimalisasi pengelolaannya, BAZNAS senantiasa amanah, profesional, transparansi, dan akuntabilitas (Departemen Agama RI, 2002).

Program Penyaluran dan Pendayagunaan BAZNAS Daerah

Penyaluran dana zakat adalah tujuan utama dari seluruh proses pengumpulan zakat. Kinerja suatu lembaga zakat di suatu daerah dapat diukur salah satunya melalui kualitas penyaluran dana zakat. Kualitas penyaluran ini akan berdampak kepada tingkat kepercayaan muzaki dan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, BAZNAS perlu mendesain berbagai program penyaluran yang bervariasi sehingga dapat meningkatkan kepercayaan para muzaki untuk membayar zakat melalui lembaga zakat.

Dalam menjawab persoalan ini, BAZNAS Daerah telah melaksanakan program-program penyaluran dana zakat yang bervariasi, baik yang bersifat konsumtif maupun produktif. Program-program tersebut dikelompokkan ke dalam 5 (lima) jenis program sesuai dengan kategori penyaluran yang disalurkan dana zakat, yaitu makmur, peduli, cerdas, sehat dan takwa.

Program Makmur

Program ini adalah program pemberdayaan ekonomi bagi mustahik yang menjalankan usaha-usaha mikro dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Harapan dari program ini adalah meningkatnya pendapatan para mustahik sampai suatu saat nanti mereka bisa bertransformasi menjadi muzaki. Adapun bentuk-bentuk dari program ini adalah pemberian modal tambahan baik berupa uang maupun barang, pelatihan dan pendampingan-pendampingan dalam menjalankan usahanya.

Di antara contoh dari pelaksanaan program ini adalah pemberian bantuan modal tambahan berupa aset bangunan oleh BAZNAS Clanjur untuk rumah produksi industri sabun herbal berbahan sereh di Desa Campakawarna. Program ini dipilih karena potensi desa tersebut yang mayoritas penduduknya adalah petani sereh. Lebih dari itu, tenaga kerja dari industri ini dapat diisi oleh orang-orang difabel sehingga banyak masyarakat yang bisa mengambil manfaat dari kegiatan produksi sabun ini. Program ini dinilai sangat sesuai dengan potensi masyarakat Desa Campakawarna, bahkan di antara peserta program ada yang sudah mampu menjual produk sendiri dan menghasilkan keuntungan. Namun, proses pemasaran belum dibantu sampai ke wilayah yang lebih luas karena memang masih dalam proses izin atas produk ini dan sedang diajukan untuk uji laboratorium.

Gambar 4.1 Bantuan Program Makmur: Pemberian Modal Usaha, Kerja sama dengan Difabel

Bentuk pemberian modal tambahan berupa aset yang lain adalah penyediaan lahan bagi mustahik untuk bercocok tanam yang diinisiasi oleh BAZNAS Kabupaten Sukabumi bekerja sama dengan beberapa masjid di Sukabumi. Program ini disebut Gerakan Menghijaukan Masjid dan Musala (GM3) karena lahannya berada di lingkungan masjid dan musala. Selain itu, BAZNAS Kabupaten Sukabumi juga mendirikan Zakat Mart (Z-Mart) bagi mustahik yang mempunyai usaha sehingga mereka bisa menjual barangnya di tempat tersebut. Hingga saat ini, terdapat 50 (lima puluh) Z-mart di Kabupaten Sukabumi. BAZNAS Kabupaten Sukabumi juga mengimplementasikan model bisnis Nabi di mana biaya operasional dan harga beli suatu barang disampaikan dan kemudian harga jualnya dikembalikan kepada pembeli untuk secara sukarela menentukan tambahan laba untuk Z-mart. Hal ini dilakukan dalam rangka dakwah nilai-nilai keislaman, seperti kejujuran dalam berbisnis.

Adapun pemberian modal tambahan yang lain berupa barang seperti yang dipraktikkan pada BAZNAS Kabupaten Musi Banyuasin berupa anak kambing kepada mustahik yang beternak, benih ikan bagi nelayan pembudi daya ikan, mesin jahit bagi penjahit secara berkelompok. Bantuan diberikan untuk dikelola bersama oleh kelompok petani, peternak maupun penjahit. Apabila kinerjanya bagus, maka bantuan akan diberikan kembali sebagai bentuk dukungan. Selain itu, di BAZNAS Kabupaten Cianjur juga memiliki program pemberian gerobak bagi penjual sayuran, bakso, siomai dan sejenisnya sehingga mereka bisa lebih produktif.

Gambar 4. 2 Bantuan Program Makmur: Pemberian Alat Jahitan dan Balai Ternak

Untuk penyaluran dana zakat berupa pendampingan usaha dicontohkan oleh BAZNAS NTB yang melaksanakan program pemberdayaan mustahik bekerja sama dengan Bank NTB Syariah dan Koperasi Syariah sehingga modal yang diberikan oleh BAZNAS NTB dapat dikelola dengan baik dan risiko kerugian dapat ditekan seminimal mungkin. Sedangkan di BAZNAS Kabupaten Musi Banyuasin, para penjahit diberikan pelatihan tentang jahit-menjahit sekaligus diadakan pendampingan dalam pelaksanaannya sehingga produktivitas mereka dapat terjaga.

Program Peduli

Program ini ditujukan kepada mustahik untuk membantu meringankan kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Bentuk panyaluran program ini berupa uang tunai dan fasilitas yang dapat digunakan oleh mustahik secara langsung.

Untuk uang tunai diberikan kepada golongan fakir dan miskin yang belum memiliki pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok, adapun bagi yang telah memiliki pendapatan akan diikutkan ke dalam program makmur. Golongan ini terdiri dari orang jompo dan anak yatim yang sudah diverifikasi oleh pemerintah setempat bahwa mereka memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh BAZNAS. Selanjutnya, golongan ini dikategorikan sebagai mustahik tetap yang akan diberikan santunan bulanan senilai Rp500.000 per bulan.

Setiap BAZNAS Daerah mempunyai cara dan pola masing-masing dalam menyalurkannya uang santunan tersebut. Ada yang menyalurkannya secara langsung melalui perkumpulan rutin bulanan mustahik di kantor BAZNAS ataupun melalui perkumpulan yang diadakan bersama pemerintah atau instansi-instansi setempat. Selain itu, ada juga yang menyalurkannya melalui pemerintah desa masing-masing atau dengan membayarkan uang santunan tersebut kepada warung makan agar menyiapkan makanan bagi mustahik tiap harinya.

Sementara itu, penyaluran dana melalui penyediaan fasilitas-fasilitas diantaranya adalah penyediaan Rumah Tinggal Layak Huni (Rutilahu) melalui program bedah rumah. Dalam program ini, rumah milik mustahik yang tidak layak huni akan direnovasi menggunakan dana zakat. Program ini tentunya dilaksanakan dengan bekerja sama dan koordinasi dengan dinas terkait karena program serupa juga dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman. Selain itu, terdapat pula program pembuatan jamban di daerah-daerah yang masih menggunakan sungai sebagai mandi, cuci, kakus (MCK) karena tidak memiliki fasilitas MCK di rumahnya.

Gambar 4. 3 Bantuan Program Peduli: Rehab RUTILAHU

Program Cerdas

Program ini berupa beasiswa yang dikhususkan untuk membantu biaya pendidikan keluarga mustahik agar mereka mendapatkan pendidikan yang lebih baik sehingga dapat memberikan manfaat baik bagi keluarga maupun masyarakat sekitar.

Sasaran dari program ini adalah anak-anak dari keluarga mustahik yang menempuh pendidikan di tingkat TK, SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi. Selain itu, beasiswa juga ditujukan untuk anak-anak yang menempuh pendidikan di Madrasah Diniyah dan pesantren-pesantren. Beasiswa ini bersifat rutin diberikan setiap tahun. Selanjutnya, ada juga beasiswa yang bersifat insidentil, yaitu beasiswa yang diberikan kepada anak dari keluarga mustahik yang mempunyai potensi menjadi ulama untuk menempuh pendidikan di Timur Tengah.

Gambar 4. 4 Bantuan Program Cerdas

Dalam implementasinya, BAZNAS Kabupaten Cianjur mempunyai program satu keluarga miskin satu sarjana. Dengan program ini, harapannya anak tertua dari keluarga miskin minimal lulus sarjana sehingga dapat bekerja dan menghasilkan pendapatan yang layak untuk membantu adik-adiknya melanjutkan sekolah. Program ini merupakan program yang sangat strategis dalam memutus rantai kemiskinan pada keluarga tersebut.

Selain itu BAZNAS Kabupaten Sukabumi memiliki program pembibitan generasi Qur'ani yang diharapkan menjadi Qari' dan Hafiz. BAZNAS Kabupaten Sukabumi memberikan bantuan biaya pendidikan dan biaya yang dibutuhkan dalam mengikuti kompetisi/perlombaan tilawah quran bekerja sama dengan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an.

Program Sehat

Program ini dirancang untuk memberikan akses kesehatan bagi para mustahik yang tidak mampu mengeluarkan biaya untuk mendapatkan layanan kesehatan di rumah sakit. Secara umum, bentuk-bentuk program yang dibuat BAZNAS Daerah hampir sama, yaitu berupa bantuan dana untuk biaya kesehatan dan bantuan penyediaan fasilitas kesehatan.

BAZNAS Kabupaten Cianjur memiliki program untuk kesehatan kaum dhuafa yang disebut dengan program Cianjur Sehat. Dalam program ini sebagian dana zakat disisihkan untuk program peduli kesehatan umat, baik dalam bentuk bantuan kesehatan reguler maupun non-reguler. Reguler berarti program kesehatan yang dilakukan untuk proses kesembuhan bagi dhuafa yang sakit. Non-reguler berarti pemberian bantuan bagi yang memerlukan alat kesehatan seperti kursi roda, tongkat, dan bahkan fasilitas kesehatan lainnya. Dalam program ini BAZNAS bekerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk melakukan identifikasi dan penetapan dhuafa yang layak dibantu. Selama masa pandemi Covid-19, BAZNAS Kabupaten Cianjur telah berkontribusi dalam program bantuan vaksin di beberapa kecamatan.

Gambar 4. 5 Bantuan Program Sehat

BAZNAS Kabupaten Sukabumi dalam pelaksanaan program kesehatan tidak jauh berbeda dengan program di Cianjur, yaitu memfasilitasi biaya bagi pasien-pasien keluarga miskin yang masuk rumah sakit. Akan tetapi, BAZNAS Kabupaten Sukabumi memiliki rencana yang lebih strategis, yaitu akan membangun 'rumah sakit gratis bagi kaum dhuafa' yang mendapat respons positif dari Bupati. Meskipun demikian, Bupati menyarankan untuk mendahulukan pembangunan klinik kesehatan dilengkapi ambulans/mobil jenazah di setiap kecamatan agar manfaat program penyaluran zakat berbasis kesehatan dapat dirasakan secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Sukabumi.

Program Takwa

Program ini ditujukan untuk mendukung peningkatan kualitas pemahaman dan ketaatan beragama masyarakat Muslim. Sebagai contoh, BAZNAS Kabupaten Musi Banyuasin mengalokasikan dana bagi para pengajar Al-qur'an sebagai bantuan kesejahteraan. Sama halnya praktik pada BAZNAS Kabupaten Cianjur, kesejahteraan para pengajar Al-qur'an dan kader dai serta bantuan sarana prasarana majelis taklim menjadi objek program ini. Termasuk di dalamnya bantuan mushaf Al-qur'an. Begitu juga pada BAZNAS Kabupaten Sukabumi yang memiliki program serupa, yaitu memfasilitasi dakwah Islam dalam setiap kegiatan, tambahan sarana untuk lembaga pendidikan, pondok pesantren dan majelis taklim. Bahkan, pada setiap bulan Ramadan BAZNAS Kabupaten Sukabumi dapat mendistribusikan dana untuk program ini antara Rp500-700 juta untuk para guru Al-qur'an dan guru Madrasah Diniyah.

Gambar 4. 6 Bantuan Program Takwa

BAZNAS Provinsi Nusa Tenggara Barat

BAZNAS Provinsi Nusa Tenggara Barat pernah mendapatkan penghargaan dengan Kategori Pendistribusian ZIS Terbaik dan Kategori Pendayagunaan ZIS Terbaik tahun 2019. Berdasarkan data, penyaluran BAZNAS Provinsi Nusa Tenggara Barat selama dua tahun terakhir mengalami kenaikan sebesar 36 persen dari Rp21,99 miliar di tahun 2019 menjadi Rp 29,85 miliar tahun 2020.

Penyaluran berdasarkan *ashnaf* (penerima manfaat) pada gambar di bawah ini adalah total dana yang disalurkan oleh BAZNAS Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menjadi objek kajian selama dua tahun terakhir. Penerima zakat dibagi ke dalam delapan (8) golongan atau *ashnaf* antara lain fakir, miskin, amil, muallaf, *riqob*, *gharimin*, *fisabilillah*, dan *ibnu sabil* berdasarkan Quran Surat At-Taubah ayat 60.

Gambar 4. 7 Penyaluran BAZNAS Provinsi NTB Berdasarkan *Ashnaf* dalam Miliar Rupiah

Sumber: Sistem Manajemen Informasi BAZNAS (SiMBA) & FGD BAZNAS Provinsi NTB: 2021

Data penyaluran di atas disusun dan dikelola secara terpisah antara pos dana zakat dan pos dana infak, sedekah, CSR, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pada tahun 2020, sebagian besar penyaluran BAZNAS Nusa Tenggara Barat diberikan kepada kelompok Miskin, yakni sebesar Rp 10,97 miliar. Sama dengan tahun sebelumnya, sebagian besar penyaluran pada tahun 2019 juga disalurkan kepada *ashnaf* miskin sebesar Rp 9,90 miliar.

Penyaluran terbesar kedua pada tahun 2020 disalurkan untuk kategori *fisabilillah*. Golongan ini menerima Rp 10,41 miliar. Proporsi ini lebih tinggi 16 persen daripada proporsi tahun sebelumnya yang hanya mencapai Rp 4,44 miliar pada tahun 2019. Berikutnya, penyaluran terbesar ketiga adalah kelompok fakir, yaitu menerima Rp3,74 miliar. Nilai ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar Rp3,30 miliar.

Alokasi dana zakat lainnya adalah untuk golongan amil. Pada tahun 2020, alokasi dana zakat untuk golongan amil sejumlah Rp 3,70 miliar. Jumlah ini mengalami peningkatan pada tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp 3,31 miliar. Peningkatan ini erat kaitannya dengan

semakin tingginya mobilitas dan aktivitas BAZNAS Provinsi Nusa Tenggara Barat sehingga membutuhkan dukungan biaya operasional yang mencukupi.

Adapun porsi penyaluran dana zakat untuk operasional amil di BAZNAS Nusa Tenggara Barat masih tergolong rasional dan wajar karena masih di bawah 12,5 persen atau 1/8 dari total penyaluran. Selain itu, alokasi dana zakat untuk amil ini tidak hanya digunakan untuk biaya SDM profesi amil, akan tetapi termasuk juga mencakup biaya operasional bagi BAZNAS Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Praktik penyaluran dana ZIS saat ini telah menyeluruh yang mencakup aspek-aspek penting baik dari segi spiritual, sosial maupun material. Gambar di atas menjelaskan realisasi penyaluran dana ZIS berdasarkan 5 (lima) bidang yang telah diinisiasi oleh BAZNAS.

Gambar 4. 8 Penyaluran BAZNAS Provinsi NTB Berdasarkan Bidang dalam Miliar Rupiah

Sumber: Sistem Manajemen Informasi BAZNAS (SiMBA) & FGD BAZNAS Provinsi NTB: 2021

Total dana penyaluran berdasarkan bidang ini merupakan total dana penyaluran diluar asnaf amil dan biaya operasional. Berdasarkan Peraturan BAZNAS/PERBAZNAS Nomor 3 tahun 2018, penyaluran dana ZIS dibedakan dalam 2 (dua) cara, yaitu pendistribusian yang sifatnya konsumtif dan pendayagunaan yang sifatnya produktif. Adapun yang termasuk dalam bidang pendistribusian adalah pendidikan, dakwah, kesehatan dan sosial kemanusiaan. Sedangkan yang termasuk dalam bidang pendayagunaan adalah penyaluran untuk kegiatan ekonomi. Meskipun demikian, terdapat beberapa program penyaluran yang mencakup beberapa bidang sekaligus.

Berdasarkan gambar 4.2, alokasi dana zakat di BAZNAS Provinsi Nusa Tenggara Barat terbesar tahun 2020 adalah untuk kegiatan kemanusiaan, sebesar Rp 9,09 miliar. Hal ini membuktikan bahwa saat ini, fokus utama BAZNAS Provinsi Nusa Tenggara Barat ialah untuk menyelamatkan masyarakat dari dampak pandemi Covid-19. Proporsi terbesar kedua adalah penyaluran untuk bidang dakwah, yaitu sebesar Rp 7,88 miliar. Selanjutnya, untuk bidang ekonomi proporsi penyaluran dana zakat adalah Rp 1,61 miliar. Berdasarkan uraian di atas, proporsi penyaluran dana ZIS berdasarkan kelima bidang besarnya bervariasi. Maka, dapat disimpulkan bahwa tren penyaluran dana ZIS tahun 2020 yang dilakukan oleh

BAZNAS Provinsi Nusa Tenggara Barat berlandaskan akurasi prioritas, kebutuhan, dan kondisi mustahik.

BAZNAS Kabupaten Cianjur

Pada tahun 2020, sebagian besar penyaluran BAZNAS Kabupaten Cianjur diberikan kepada kelompok Miskin dan Fakir yakni sebesar Rp6,72 miliar. Sama dengan tahun sebelumnya, sebagian besar penyaluran pada tahun 2019 juga disalurkan kepada *ashnaf* miskin sebesar Rp 13,55 miliar. Penyaluran terbesar ketiga pada tahun 2020 disalurkan untuk kategori infak/sedekah terikat (IST). Golongan ini menerima Rp 1,84 miliar.

Adapun porsi penyaluran dana zakat untuk operasional amil di BAZNAS Kabupaten Cianjur tergolong rendah. Hal ini disebabkan karena BAZNAS Cianjur menerima APBD setiap tahunnya. Tahun 2020, BAZNAS Cianjur menerima Rp200 juta yang mengalami kenaikan yang progresif dari dua tahun lalu.

Gambar 4. 9 Penyaluran BAZNAS Kabupaten Cianjur Berdasarkan *Ashnaf* dalam Miliar Rupiah

Sumber: Sistem Manajemen Informasi BAZNAS (SiMBA) & FGD BAZNAS Kabupaten Cianjur: 2021

Gambar 4. 10 Penyaluran BAZNAS Kabupaten Cianjur Berdasarkan Bidang Tahun dalam Miliar Rupiah
Sumber: Sistem Manajemen Informasi BAZNAS (SiMBA) & FGD BAZNAS Kabupaten Cianjur: 2021

Berdasarkan alokasi bidangnya, penyaluran terbesar di BAZNAS Kabupaten Cianjur tahun 2020 adalah untuk kegiatan kemanusiaan sebesar Rp15,60 miliar. Pada 2020, BAZNAS Cianjur hanya tercatat menyalurkan pada bidang kemanusiaan, hal ini disebabkan adanya dampak Covid-19 untuk segera di atasi oleh lembaga sosial di daerah Cianjur agar dampaknya tidak menyebar pesat.

Pada tahun 2019, proporsi terbesar adalah penyaluran untuk bidang dakwah yaitu sebesar Rp12,52 miliar. Selanjutnya, untuk bidang ekonomi proporsi penyaluran dana zakat adalah Rp3,41 miliar dan bidang kemanusiaan hanya sebesar Rp1,34 miliar. Berdasarkan uraian di atas, proporsi penyaluran dana ZIS berdasarkan kelima bidang besarnya bervariasi. Maka, dapat disimpulkan bahwa tren penyaluran dana ZIS tahun 2020 yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Cianjur berlandaskan akurasi prioritas, kebutuhan, dan kondisi mustahik.

BAZNAS Kota Padang Panjang

Gambar 4. 11 Penyaluran BAZNAS Kota Padang Panjang Berdasarkan Asnaf dalam Miliar Rupiah

Sumber: Sistem Manajemen Informasi BAZNAS (SiMBA) & FGD BAZNAS Kota Padang Panjang: 2021

Pada tahun 2020, sebagian besar penyaluran BAZNAS Kota Padang Panjang diberikan kepada kelompok Miskin, Fakir dan Amil, masing-masing yakni sebesar Rp2,33 miliar, Rp1,38 miliar dan Rp0,5 miliar. Sama dengan tahun sebelumnya, sebagian besar penyaluran pada tahun 2019 juga disalurkan kepada *ashnaf* Miskin, Fakir dan Amil, masing-masing yakni sebesar Rp1,49 miliar, Rp0,99 miliar dan Rp0,53 miliar. Adapun porsi penyaluran dana zakat untuk operasional amil di BAZNAS Kota Padang Panjang masih tergolong rasional dan wajar karena masih di bawah 12,5 persen atau 1/8 dari total penyaluran.

Gambar 4. 12 Penyaluran BAZNAS Kota Padang Panjang Berdasarkan Bidang dalam Miliar Rupiah

Sumber: Sistem Manajemen Informasi BAZNAS (SiMBA) & FGD BAZNAS Kota Padang Panjang: 2021

Berdasarkan alokasi bidangnya, penyaluran terbesar tahun 2020 di BAZNAS Kota Padang Panjang adalah untuk kegiatan kemanusiaan, sebesar Rp1,39 miliar. Berbeda dari tahun sebelumnya 2019, fokus penyaluran BAZNAS Kota Padang Panjang ialah bidang pendidikan, sebesar Rp0,69 miliar.

Proporsi terbesar selanjutnya adalah penyaluran untuk bidang ekonomi, yaitu sebesar Rp 1,10 miliar. Selanjutnya, untuk bidang pendidikan proporsi penyaluran dana zakat adalah Rp1,08 miliar dan bidang dakwah hanya sebesar Rp0,01 miliar. Berdasarkan uraian di atas, proporsi penyaluran dana ZIS berdasarkan kelima bidang besarnya bervariasi. Maka, dapat disimpulkan bahwa tren penyaluran dana ZIS tahun 2020 yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Padang Panjang berlandaskan akurasi prioritas, kebutuhan, dan kondisi mustahik.

BAZNAS Kabupaten Musi Banyuasin

Pada 2020, sebagian besar penyaluran BAZNAS Kabupaten Musi Banyuasin diberikan kepada kelompok Miskin, yakni sebesar Rp6,14 miliar. Sama dengan tahun sebelumnya, sebagian besar penyaluran pada tahun 2019 juga disalurkan kepada *ashnaf* miskin sebesar Rp4,73 miliar.

Penyaluran terbesar kedua pada tahun 2020 disalurkan untuk kategori Fakir. Golongan ini menerima Rp2,14 miliar. Namun, karena *ashnaf* fakir dan miskin kerap kali berada di lingkungan yang sama dan sulit dipisahkan, penyalurannya pun dilakukan bersamaan untuk kedua *ashnaf* tersebut. Sehingga dalam pada tahun 2019 fakir dan miskin dikategorisasikan ke dalam satu kelompok.

Alokasi dana zakat lainnya adalah untuk golongan amil. Pada tahun 2020, alokasi dana zakat untuk golongan amil sejumlah Rp1,29 miliar. Jumlah ini mengalami peningkatan pada tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp0,79 miliar. Peningkatan ini erat kaitannya dengan semakin tingginya mobilitas dan aktivitas BAZNAS Kabupaten Musi Banyuasin sehingga membutuhkan dukungan biaya operasional yang mencukupi.

Gambar 4. 13 Penyaluran BAZNAS Kabupaten Musi Banyuasin Berdasarkan Asnaf dalam Miliar Rupiah

Sumber: Sistem Manajemen Informasi BAZNAS (SiMBA) & FGD BAZNAS Kabupaten Musi Banyuasin: 2021

Berdasarkan alokasi bidangnya, penyaluran terbesar tahun 2020 di BAZNAS Kabupaten Musi Banyuasin adalah untuk kegiatan ekonomi, sebesar Rp 3,85 miliar. Ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya 2019, yaitu sebesar Rp2,30 miliar di bidang yang sama. Proporsi terbesar selanjutnya adalah penyaluran untuk bidang kemanusiaan yaitu sebesar Rp2,32 miliar. Selanjutnya, untuk bidang pendidikan proporsi penyaluran dana zakat adalah Rp1,51 miliar dan bidang dakwah hanya sebesar Rp1,07 miliar. Berdasarkan uraian di atas, proporsi penyaluran dana ZIS berdasarkan kelima bidang besarnya bervariasi. Maka, dapat disimpulkan bahwa tren penyaluran dana ZIS tahun 2020 yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Musi Banyuasin berlandaskan akurasi prioritas, kebutuhan, dan kondisi mustahik.

Gambar 4. 14 Penyaluran BAZNAS Kabupaten Musi Banyuasin Berdasarkan Bidang dalam Miliar Rupiah

BAZNAS Kabupaten Sukabumi

Pada 2020, sebagian besar penyaluran BAZNAS Kabupaten Sukabumi diberikan kepada kelompok Miskin, yakni sebesar Rp11,22 miliar. Sama dengan tahun sebelumnya, sebagian besar penyaluran pada tahun 2019 juga disalurkan kepada *ashnaf* miskin sebesar Rp21,04 miliar. Penyaluran pada golongan ini mengalami penurunan, begitu pula pada kategori fakir. Penyaluran terbesar kedua pada tahun 2020 disalurkan untuk kategori *fisabilillah*. Golongan ini menerima Rp7,60 miliar. Tahun 2019 golongan ghorimin mendapatkan Rp8,67 miliar dalam program penyalurannya.

Gambar 4. 15 Penyaluran BAZNAS Kabupaten Sukabumi Berdasarkan Asnaf dalam Miliar Rupiah

Sumber: Sistem Manajemen Informasi BAZNAS (SiMBA) & FGD BAZNAS Kabupaten Sukabumi: 2021

Berdasarkan alokasi bidangnya, penyaluran terbesar tahun 2019 di BAZNAS Kabupaten Sukabumi adalah untuk kegiatan dakwah, sebesar Rp18,61 miliar. Tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp13,33 miliar di bidang yang sama.

Proporsi terbesar selanjutnya adalah penyaluran untuk bidang kemanusiaan yaitu sebesar Rp7,35 miliar. Selanjutnya, untuk bidang ekonomi tahun 2019 proporsi penyaluran dana zakatnya adalah Rp11,44 miliar. Berdasarkan uraian di atas, proporsi penyaluran dana ZIS berdasarkan kelima bidang besarnya bervariasi. Maka, dapat disimpulkan bahwa tren penyaluran dana ZIS tahun 2020 yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Sukabumi berlandaskan akurasi prioritas, kebutuhan, dan kondisi mustahik.

Gambar 4. 16 Penyaluran BAZNAS Kabupaten Sukabumi Berdasarkan Bidang dalam Miliar Rupiah

Sumber: Sistem Manajemen Informasi BAZNAS (SiMBA) & FGD BAZNAS Kabupaten Sukabumi: 2021

Dampak Regulasi Zakat Daerah Terhadap Kinerja Penyaluran BAZNAS Daerah

Penerapan regulasi zakat daerah memberikan berbagai macam dampak positif yang dapat dirasakan oleh banyak pihak, khususnya BAZNAS Daerah itu sendiri. Secara umum dana zakat yang tersalurkan mengalami peningkatan yang signifikan dan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini memperluas jangkauan penyaluran zakat sehingga dapat mencakup sejumlah titik yang belum pernah terjamah karena terbatasnya dana zakat.

Selain itu, penyaluran dana zakat kepada 8 (delapan) golongan mustahik menjadi lebih terlihat manfaatnya. Sebelum adanya regulasi tersebut, fokus BAZNAS Daerah adalah mengatasi kesulitan yang dialami mustahik golongan fakir dan miskin sehingga golongan mustahik yang lain hanya mendapatkan porsi sedikit atau bahkan tidak ada. Dengan bertambahnya dana zakat pascapemberlakuan regulasi zakat, terlihat penambahan porsi bagi golongan-golongan mustahik yang lain. Sehingga manfaat dari dana zakat dapat dirasakan oleh golongan penerima zakat lainnya.

Di sisi yang lain, adanya regulasi zakat daerah merupakan sebuah pengakuan resmi dari pemerintah daerah terhadap eksistensi institusi BAZNAS Daerah beserta tugas dan fungsinya. Hal ini memberikan ruang yang lebih luas bagi BAZNAS Daerah dalam menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga lain khususnya lembaga yang ada di bawah pemerintah daerah, seperti kecamatan dan kelurahan, sebagai upaya untuk mengoptimalkan penyaluran dana zakat.

Kerja sama dengan lembaga lain ini menjadi penting karena jika mengandalkan SDM BAZNAS Daerah saja belum akan mencukupi, mengingat cakupan wilayah yang luas dan beragam. Maka dalam hal ini, lembaga-lembaga tersebut menjadi partner BAZNAS dalam usaha penyaluran dana zakat. Lembaga-lembaga tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda, baik sebagai sumber informasi, pengawas maupun pendamping.

Sebagai sumber informasi, kerja sama dengan pemerintah daerah setempat akan memudahkan BAZNAS daerah dalam mendapatkan informasi yang lengkap tentang data mustahik yang ada pada daerah tersebut sehingga BAZNAS dapat memetakan dengan target dari penyaluran dana zakat tersebut dan menjadi lebih tepat sasaran. Selain itu, BAZNAS dan Pemda memiliki beberapa tujuan yang sama diantaranya memerangi kemiskinan dan mewujudkan pembangunan daerah. Hal ini dapat menjadi kerja sama yang menguntungkan antara kedua belah pihak sehingga dapat mencapai tujuan bersama, yaitu kesejahteraan masyarakat.

Sebagai contoh, kerja sama BAZNAS Daerah dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) untuk ikut berpartisipasi dalam mengurangi angka kemiskinan daerah, kerja sama dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dalam program bedah rumah dan pembuatan jamban, kerja sama dengan Dinas Pertanian dan Peternakan dalam pendampingan mustahik melalui pemberian modal untuk bercocok tanam maupun beternak dan lain sebagainya.

Selain lembaga pemerintah, BAZNAS Daerah juga mendapat kemudahan dalam menginisiasi kerja sama dengan lembaga swasta. Sebagai contoh, kerja sama dengan lembaga keuangan yang dilakukan oleh BAZNAS daerah untuk membantu dalam pengawasan program pemberdayaan mustahik karena lembaga tersebut yang lebih berpengalaman dalam urusan pemberian modal dan pengawalan.

Dalam upaya menyukseskan program tersebut, BAZNAS Daerah juga melakukan kerja sama dengan koperasi-koperasi syariah untuk pendampingan pengelolaan dana zakat. Lembaga pendidikan juga digandeng dalam hal ini melalui program magang dalam proses pengawasan dan pendampingan pemberdayaan mustahik.

Kendala dalam Penyaluran dan Pendayagunaan Dana Zakat Daerah

Dalam implelementasi regulasi zakat daerah, beberapa BAZNAS masih menemui beberapa kendala dalam proses penyaluran dana zakat, di antaranya adalah keterbatasan SDM yang dimiliki dalam melakukan pengawasan terhadap beberapa program, seperti pemberian dana bantuan ke warung untuk makan sehari-hari mustahik tidak mampu, orang jompo dan anak yatim, dan pengawasan dalam program pemberdayaan mustahik.

Sebagai contoh, dalam program pendampingan usaha, belum sampai ada pendampingan terkait pemasaran produk usaha dan perencanaan bisnis (business plan). Hal ini terjadi karena beberapa BAZNAS Daerah masih belum memaksimalkan kerja sama dengan lembaga-lembaga terkait yang sebenarnya dapat membantu pelaksanaan program pendampingan tersebut. Kerja sama dengan lembaga inilah yang kiranya dapat menjadi salah satu solusi keterbatasan yang ada di BAZNAS Daerah.

Hal lain yang menjadi kendala dalam distribusi adalah pendataan mustahik. Di beberapa BAZNAS Daerah masih ada yang pola penyalurannya berdasarkan permintaan, bukan mengacu kepada pemetaan yang bersumber dari database acuan. Hal ini menyebabkan penyaluran dana zakat kurang maksimal dikarenakan oleh potensi ketidakmerataan distribusi akan cenderung tinggi. Keadaan ini menjadi lebih buruk ketika BAZNAS daerah tidak menjalin komunikasi dengan lembaga zakat lainnya terkait penyaluran zakat dan data mustahik sehingga akan ada kemungkinan tumpang tindih penerimaan dana zakat kepada mustahik. Oleh karena itu, pendataan dan penataan penyaluran antarlembaga zakat di daerah, BAZNAS dan LAZ, merupakan sebuah keniscayaan untuk menjamin tidak ada mustahik yang mendapatkan zakat dari berbagai sumber dan ada yang tidak mendapatkan zakat sama sekali.

DAMPAK REGULASI ZAKAT DAERAH TERHADAP PENGUATAN BAZNAS

Penguatan Kelembagaan

BAZNAS merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang menjalankan tugas menghimpun dan menyalurkan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS), dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) serta mengoordinasikan pengelolaan ZIS dari seluruh Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat seIndonesia. Sehingga peran regulasi zakat daerah memiliki urgensi dalam menguatkan kelembagaan lembaga zakat di Indonesia.

Dengan terbitnya regulasi zakat daerah setidaknya terdapat 2 (dua) dampak positif bagi tata kelola kelembagaan zakat. Pertama, pengakuan dan legalitas lembaga BAZNAS Daerah sebagai OPZ resmi di daerah. Pengakuan legal formal ini menjadi fondasi utama dalam segala aktivitas pengelolaan zakat, khususnya pada program pengumpulan dana zakat yang paling dirasakan dampaknya dari adanya regulasi zakat daerah.

Kedua, kelembagaan yang lebih profesional dan berkelanjutan. Dampak ini merupakan tuntutan regulasi zakat daerah kepada BAZNAS daerah sebagai penanggung jawab pengelolaan dana zakat. Oleh karena itu, dari kelima BAZNAS Daerah di atas, semuanya telah memiliki visi dan misi yang jelas dan terukur. Hal ini dapat dilihat dari tersedianya Rencana Strategis (Renstra) yang disusun secara periodik untuk menetapkan target dan perencanaan tata kelola zakat di daerah.

Gambar 5.1 Penguatan Kelembagaan: Struktur Organisasi BAZNAS Provinsi Nusa Tenggara Barat

Perlu diperhatikan dalam penguatan kelembagaan, diperlukan adanya peran serta Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam melakukan pemberdayaan UU Zakat dan UU Pemerintahan Daerah. Artinya, keberadaan Perda akan menentukan peran pemerintah

daerah berupa perlindungan dan pembinaan dalam pengelolaan zakat. Hal ini harus dilakukan secara matang dan terorganisir agar keberadaan BAZNAS pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota telah menemukan pijakan yuridisnya berupa Peraturan Daerah.

Penguatan Manajemen

Implikasi regulasi zakat daerah terhadap penguatan manajemen di BAZNAS Daerah minimal memiliki 4 (empat) dampak positif. Pertama, penguatan pada struktur pimpinan dan organisasi BAZNAS Daerah. Pimpinan dan staf terbukti lebih profesional dan fokus bekerja pada institusi BAZNAS Daerah. Hal ini dapat dilihat dari perubahan budaya organisasi yang sebelumnya lebih bernuansa tradisional, rangkap jabatan, dan tugas sampingan menjadi budaya manajemen yang modern.

Kedua, peningkatan kualitas fungsi manajemen melalui dukungan sistem informasi manajemen berbasis IT (Sistem Manajemen Informasi BAZNAS, SiMBA) yang mencakup perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban, dan koordinasi pengelolaan zakat secara nasional.

Gambar 5. 2 Penguatan Manajemen IT: Sistem Informasi Penghimpunan (SiMBA)

Ketiga, penguatan manajemen data melalui pemetaan potensi muzaki dan mustahik. Hal ini dibuktikan dengan penerbitan dan integrasi data mustahik berbasis Nomor Identifikasi Mustahik (NIM). Sehingga, setiap mustahik mendapatkan NIM dan data mustahik dapat diakses oleh instansi lain yang terkait seperti Dinas Sosial. Data ini sebagai upaya untuk memitigasi risiko tumpang tindih penyaluran dana zakat dan potensi adanya sindikat mustahik yang mendapatkan zakat dari beberapa lembaga pengelola zakat secara bersamaan.

Keempat, tata kelola pada BAZNAS Daerah terbukti lebih akuntabel yang dilihat dari audit internal dan eksternal oleh akuntan publik dengan hasil penilaian Wajar Tanpa Pengecualian. Selain itu, untuk meningkatkan akuntabilitas, BAZNAS Daerah juga telah mendapatkan akreditasi pengelolaan zakat dari Kementerian Agama RI.

Sebagai tambahan, dalam pengelolaan risiko, BAZNAS Daerah telah mengupayakan pengendalian risiko dengan mengimplementasikan standar manajemen risiko sederhana dalam pengelolaan dana zakat. Manajemen risiko dilakukan dengan cara melakukan *assessment*/penilaian/survei terhadap penerima bantuan, penyertaan surat keterangan dari Kades/Lurah, serta kewajiban mencantumkan kontak personal setiap penerima bantuan minimal melalui Kepala Desa/Lurah. Penguatan manajemen risiko diperlukan sebagai panduan teknis yang lebih terperinci dan operasional untuk dapat dijadikan rujukan lembaga pengelola zakat.

Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM)

Berdasarkan hasil FGD bersama BAZNAS Provinsi dan Kabupaten/Kota, implementasi regulasi zakat terhadap penguatan SDM dapat dikategorikan kepada 3 (tiga) dampak positif. Pertama, status kepegawaian di BAZNAS Daerah menjadi lebih jelas. Artinya sejak regulasi zakat diterbitkan tidak terdapat amil yang rangkap jabatan sehingga ketidakefektifan dalam menjalankan fungsinya tidak terjadi.

Kedua, peningkatan kompetensi melalui sertifikasi amil. Hal ini sejalan dengan tuntutan regulasi terkait pengelolaan yang profesional sehingga BAZNAS Provinsi dan Kabupaten/Kota mewajibkan seluruh perangkatnya mendapatkan sertifikasi amil, baik oleh Kementerian Agama maupun dari Lemdiklat BAZNAS. Ketiga, standardisasi kesejahteraan amil. Kualitas kesejahteraan amil dapat lebih diperbaiki baik disebabkan oleh dukungan dan perhatian Pemerintah Daerah maupun dari meningkatnya jumlah pengumpulan zakat yang juga berimplikasi bertambahnya porsi alokasi dana amil. Sehingga, profesi amil diapresiasi dengan kesejahteraan yang layak dan di atas UMR.

Gambar 5. 3 Penguatan Sumber Daya Manusia

Selain itu, dalam penguatan SDM, beberapa BAZNAS Provinsi dan Kabupaten/Kota telah memiliki sistem dan pedoman pengelolaan sukarelawan. Pengelolaan sukarelawan ini kemudian diatur dalam sebuah kode etik sukarelawan, dan monitoring serta evaluasi secara berkala. Sebagai tambahan, BAZNAS Daerah sudah mulai merencanakan jenjang karier

pegawai BAZNAS Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam kaitannya sebagai lembaga pemerintah nonstruktural.

Tantangan masalah SDM dapat terjadi apabila lembaga pengelola zakat tidak dapat merekrut, mempertahankan, dan mengelola sumber daya manusia OPZ, termasuk di dalamnya belum ada standardisasi tata kelola Amil yang baik (Good Amil Governance), belum adanya pelatihan Amil yang terstruktur dan sistemik, tidak adanya kejelasan mengenai jenjang karier Amil, Amil digaji di bawah standar, *mindset* bahwa OPZ bukan pilihan utama pencari kerja yang berbakat hingga tidak adanya komunikasi yang baik. Masalah tersebut di atas harus dapat diselesaikan oleh BAZNAS daerah.

Penguatan Sarana Prasarana

Dalam rangka memperkuat posisi lembaga, keberadaan sarana bangunan kantor merupakan suatu hal yang penting sebagai wadah memfasilitasi koordinasi dan kinerja yang baik dari lembaga tersebut. Untuk memperkuat posisi BAZNAS Daerah sebagai lembaga pemerintah yang strategis di Pemerintahan Daerah.

Merujuk kepada hasil FGD, implikasi regulasi zakat terhadap penguatan sarana dan prasarana BAZNAS Daerah adalah sebagai berikut: Pertama, pengadaan fasilitas BAZNAS Daerah secara mandiri. Hal ini dapat dicapai karena meningkatnya pengumpulan dana zakat sehingga tersedianya alokasi dana amil yang memadai untuk pengadaan fasilitas kantor. Sehingga, setiap BAZNAS Provinsi dan Kabupaten/Kota telah memiliki kantor sendiri dengan letak yang strategis di daerah masing-masing.

Kedua, ketersediaan dukungan finansial dari Pemerintah Daerah melalui alokasi APBD Provinsi/Kota/Kabupaten. Alokasi dana dari APBD ini menjadi salah satu poin yang tercantum dalam Peraturan Daerah. Dukungan tambahan ini sangat penting bagi penguatan BAZNAS Daerah, khususnya untuk menambah sarana dan prasarana pengembangan pengelolaan zakat daerah. Sebagai contoh, BAZNAS Kabupaten Musi Banyuasin telah memiliki rumah tahfidz dan TK Islam Terpadu atas dukungan APBD Kabupaten Musi Banyuasin. Selain itu, pada tahun 2021 BAZNAS Provinsi NTB memiliki gedung baru yang terintegrasi di pusat kantor Pemerintahan Daerah yang berlokasi di depan Lapangan Sangkareang Mataram.

Gambar 5. 4 Penguatan Sarana Prasarana: Gedung Baru BAZNAS Provinsi Nusa Tenggara Barat

Pengadaan sarana prasarana baik secara mandiri melalui alokasi dana amil maupun dukungan APBD, tentunya akan menunjang pengelolaan ZIS yang profesional. Dengan adanya sarana prasarana yang mendukung inilah diharapkan BAZNAS Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat lebih meningkatkan kualitas tata kelola ZIS di setiap daerah.

Penguatan Jaringan

Merujuk kepada hasil FGD bersama BAZNAS Provinsi/Kabupaten/Kota, dapat disimpulkan 3 (tiga) dampak positif dari implementasi regulasi zakat daerah. Pertama, penguatan jaringan dengan instansi pemerintah daerah, seperti Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislautkan), Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Kesehatan (Dinkes), dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin). Hal ini dapat dilihat dari kerja sama dan koordinasi pengumpulan zakat melalui pembentukan UPZ di masing-masing kantor instansi perintah daerah. Selain itu, jaringan UPZ BAZNAS Daerah juga dibangun bersama aparat pemerintahan di kecamatan dan desa yang membantu proses pengumpulan dan penyaluran zakat.

Kedua, penguatan kerja sama dengan institusi keagamaan. Dampak ini dapat dilihat dari kerja sama BAZNAS Daerah dengan MUI dan penyuluh agama di setiap daerah. Peran kedua institusi ini sangat penting dalam upaya sosialisasi perubahan pola praktik pembayaran zakat masyarakat yang cenderung masih tradisional kepada pengelolaan zakat yang profesional melalui BAZNAS Daerah.

Ketiga, perluasan kerja sama dengan masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pada bidang pemberdayaan dan koperasi syariah. Kerja sama dengan masyarakat dapat dilihat dari kerja sama pengumpulan zakat dari para pengusaha dan melalui bantuan tokoh masyarakat dan agama. Adapun dalam penyaluran dan pendayagunaan zakat, BAZNAS Daerah telah menjalin kerja sama dengan LSM pemberdayaan dalam pendampingan program zakat produktif. Lebih dari itu, kerja sama juga dilakukan dengan koperasi syariah dalam pendayagunaan zakat dengan model keuangan mikro. Hal ini dapat dilihat dari salah satu

program BAZNAS Provinsi NTB “Pemberdayaan Mustahik” melalui kelompok usaha mikro bakulan (program Z-Mart dan Microfinance) yang merupakan kerja sama bersama koperasi syariah.

Implementasi regulasi zakat daerah telah memberikan manfaat pada penguatan jaringan BAZNAS Daerah, terutama pada jaringan antarinstansi dan dinas di pemerintahan daerah. Selanjutnya, pengembangan dan penguatan jaringan BAZNAS Daerah diharapkan dapat diarahkan kepada jaringan dengan lembaga non-pemerintah, khususnya dengan LAZ yang dibentuk oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil FGD bersama 5 BAZNAS terpilih, yaitu: BAZNAS Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), BAZNAS Kabupaten Cianjur, BAZNAS Kabupaten Sukabumi, BAZNAS Kabupaten Musi Banyuasin dan BAZNAS Kota Padang Panjang, dampak regulasi zakat daerah terhadap penguatan kelembagaan, manajemen, SDM, sarana prasarana dan jaringan masing-masing BAZNAS adalah sebagai berikut:

BAZNAS Provinsi Nusa Tenggara Barat

Regulasi BAZNAS Provinsi Nusa Tenggara Barat berlandaskan pada peraturan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, PP No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Perda NTB No. 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Zakat dan Pergub NTB No. 16 Tahun 2016 tentang Teknis Penyelenggaraan Pengelolaan Zakat dalam Aktivitas BAZNAS pada Umumnya.

Adanya regulasi daerah juga mendukung jalur koordinasi BAZNAS Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Pemerintah Daerah berjalan dengan sangat baik. Dalam penguatan kelembagaan, BAZNAS Nusa Tenggara Barat menjadi pusat koordinasi pengelolaan ZIS di Nusa Tenggara Barat. Pelaporan pengelolaan ZIS secara rutin dilaporkan oleh Pimpinan BAZNAS Nusa Tenggara Barat kepada Pemerintah Daerah dan Kanwil Kemenag Nusa Tenggara Barat serta rutin mengadakan rakorda minimal 2 kali setahun bersama pihak-pihak terkait.

Sebagai penguatan manajemen, BAZNAS Provinsi Nusa Tenggara Barat berkolaborasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan), Dinas Sosial (Dinsos), Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Unit Pengumpul Zakat (yang mengajukan tugas pembantuan) dalam bidang pendistribusian. BAZNAS Provinsi Nusa Tenggara Barat menggunakan teknologi informasi dalam mengelola databasenya. Aplikasi sistem berzakat juga sudah diterapkan dalam manajemen pengelolaannya.

BAZNAS Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam melakukan pengelolaan ZIS mengedepankan amil yang amanah, profesional, jujur, disiplin dan adil. Hal tersebut sesuai dengan Visi BAZNAS Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2020-2025. Untuk menuju visi tersebut, BAZNAS Provinsi Nusa Tenggara Barat secara rutin melakukan monitoring dan evaluasi SDM dan memberikan pelatihan *soft skill*. Diharapkan dengan adanya kegiatan positif tersebut bisa meningkatkan kapabilitas dan profesionalitas amil yang lebih berkompeten untuk mencapai visi yang diinginkan.

Dalam penguatan sarana prasarananya, BAZNAS Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki kantor yang strategis di tengah Kota Mataram dan berlokasi di Destinasi Wisata Unggulan di Nusa Tenggara Barat. Sarana prasarana BAZNAS Provinsi Nusa Tenggara Barat juga menunjang untuk pengelolaan ZIS yang profesional. Dengan adanya sarana prasarana yang mendukung inilah diharapkan BAZNAS Provinsi Nusa Tenggara Barat lebih meningkatkan pengelolaan ZIS di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

BAZNAS Provinsi Nusa Tenggara Barat telah didukung oleh pemerintah daerah dengan dikeluarkannya Perda Nusa Tenggara Barat No. 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Zakat dan Pergub Nusa Tenggara Barat No. 16 Tahun 2016 tentang Teknis Penyelenggaraan Pengelolaan Zakat. Dengan adanya peraturan tersebut BAZNAS Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat mengelola ZIS dengan maksimal.

Regulasi zakat di kawasan Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki dampak yang positif bagi pengumpulan maupun distribusi dana ZIS. Namun, secara garis besar BAZNAS juga memiliki kendala dalam peraturan zakat di BAZNAS Provinsi Nusa Tenggara Barat, antara lain masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang pengumpulan ZIS di BAZNAS Provinsi Nusa Tenggara Barat sehingga masyarakat masih cenderung menyalurkan ZIS secara pribadi ke keluarga atau warga sekitar tanpa melalui lembaga pengumpulan ZIS.

BAZNAS Kabupaten Cianjur

Berdasarkan hasil IZN di tahun 2020, nilai IZN BAZNAS Kabupaten Cianjur adalah sebesar 0,72 atau masuk kategori Baik. Nilai ini merupakan pembobotan dari dua dimensi pembentuk IZN, yaitu dimensi makro dan mikro. Salah satunya pada nilai dimensi makro sebesar 0,80 (Baik), didapat dari tiga indikator penyusun dimensi tersebut yaitu regulasi, dukungan APBD, dan database lembaga zakat. Salah satu indikatornya, regulasi daerah bernilai 1,00 yang menunjukkan telah adanya peraturan pengelolaan zakat di tingkat Kabupaten Cianjur termasuk dukungan dan partisipasi aktif dari kepala daerah setempat (Puskas BAZNAS, 2020).

Dalam penguatan kelembagaannya, BAZNAS Kabupaten Cianjur memiliki visi “Zakat untuk Kesejahteraan dan Keberkahan Ummat”. Untuk mewujudkan visi tersebut, dibentuklah misi: (1) Memberikan penjelasan tentang hikmah Zakat, Infak dan Sedekah serta ibadah keharta bendaan lainnya dalam Islam, serta ketentuan syara/hukum dan cara melaksanakan ibadah ZIS; (2) Memberikan pelayanan yang prima bagi mereka yang melaksanakan ibadah keharta bendaan dalam Islam, dengan membentuk UPZ-UPZ pada Unit Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dibaleka/ Instansi Pemerintah dan Perusahaan Pemerintahan maupun Swasta dan UPZ Desa/ Kelurahan Masjid/ RW/ Ponpes/ Madrasah/ Sekolah; (3) Melakukan pengumpulan Zakat, Infak/Sedekah dan dana keagamaan lainnya dari Ummat Islam khususnya Muzaki; serta (4) Melaksanakan pendistribusian dan pendayagunaan hasil ZIS sesuai dengan ketentuan Agama serta sejalan dengan rencana pembangunan Sosial Ekonomi Masyarakat.

Dalam rangka pencapaian dan memperkuat terciptanya visi misi, BAZNAS Kabupaten Cianjur memiliki jalur koordinasi dengan pemerintah daerah dengan membentuk UPZ di lingkungan OPD instansi pemerintah. Selain hal tersebut, BAZNAS Kabupaten Cianjur

bekerja sama dengan OPD instansi pemerintah dalam penyaluran dan pengumpulan dana ZIS. Inilah fungsi dan peran BAZNAS Kabupaten Cianjur sebagai lembaga resmi yang mengelola dana ZIS di wilayah Kabupaten Cianjur serta sebagai pelaksana Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Secara tidak langsung, peraturan daerah juga menimbulkan peluang dan tantangan bagi pelaksana Perda Zakat. Dalam penguatan sumber daya manusia yang dimiliki oleh BAZNAS Kabupaten Cianjur, pihak BAZNAS melakukan/mengadakan pelatihan dan pembinaan pengelolaan zakat untuk meningkatkan kualitas para anggotanya. Pembangunan mental anggota dan pemberian motivasi kerja juga diberikan untuk mewujudkan hasil yang maksimal.

Selain hal tersebut, BAZNAS Kabupaten Cianjur juga memiliki tantangan dalam penguatan sarana dan prasarannya yang tak lain adalah teknologi. Berkembangnya teknologi memberikan tantangan dan peluang dalam terlaksananya peraturan daerah baik terkait penyaluran maupun pengumpulannya. Oleh karenanya, strategi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Cianjur dalam hal ini diantaranya dengan memberikan pelatihan dan rekrutmen SDM yang mampu dan profesional dibidang terkait.

Sebagai penguatan jaringan, BAZNAS Kabupaten Cianjur juga membentuk UPZ Kecamatan, UPZ OPD, UPZ DKM, dan lain-lain untuk memperluas dan mewujudkan visi misinya. Tidak hanya membentuk dan melantik pengurus UPZ yang dimaksud, BAZNAS Kabupaten Cianjur juga menyelenggarakan bimbingan teknis (BIMTEK) kepada UPZ yang telah dibentuknya.

Regulasi zakat di kawasan Kabupaten Cianjur memiliki dampak yang positif bagi pengumpulan maupun distribusi dana ZIS. Namun, secara garis besar BAZNAS Kabupaten Cianjur juga memiliki kendala, antara lain bergantinya posisi jabatan di UPZ-UPZ yang telah dibentuk dan kurangnya mobilitas dalam pelaksanaan kegiatan dikarena sudah lanjut usia sehingga daya serap akan perkembangan manajemen begitu lemah.

BAZNAS Kabupaten Sukabumi

BAZNAS Kabupaten Sukabumi mempunyai program unggulan dalam penyaluran zakat yang mendukung penguatan BAZNAS. Program unggulan yang dicanangkan menggunakan pendekatan kearifan lokal, yaitu Sukabumi Sehat, Sukabumi Cerdas, Sukabumi Takwa, Sukabumi Peduli dan Sukabumi Sejahtera.

Sukabumi Cerdas berupaya mendukung IPM (Indeks Pembangunan Manusia) di Kabupaten Sukabumi melalui kegiatan di bidang kesehatan. Dibidang kesehatan, seperti membantu atau memfasilitasi biaya untuk masyarakat miskin yang masuk rumah sakit, memberikan bantuan biaya pasien di rumah sakit, menyediakan ambulans. Sebagai upaya peningkatan program Sukabumi Cerdas, dilakukan pula perencanaan pembangunan fasilitas kesehatan gratis, seperti rumah sakit atau klinik kesehatan di setiap wilayah kecamatan juga pengadaan mobil-mobil jenazah.

Sukabumi Cerdas berupaya mendukung IPM di bidang pendidikan. Perwujudannya melalui fasilitasi bantuan biaya sekolah dan beasiswa program SAKENA (Satu Kecamatan

Satu Sarjana). Program ini disalurkan kepada 60 mahasiswa dari keluarga miskin yang memiliki kepandaian atau intelektual yang cukup bagus.

Sukabumi Takwa dalam bentuk dukungan terhadap kegiatan-kegiatan, sarana peribadatan serta fasilitas terhadap lembaga-lembaga pendidikan Islam yang ada di masjid, musala, dan pondok pesantren.

Sukabumi Peduli memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena bencana atau masyarakat yang memiliki keterbatasan, seperti pembangunan terhadap RUTILAHU (Rumah Tidak Layak Huni). Di Kabupaten Sukabumi, tercatat masih banyak warga yang memiliki rumah tidak layak huni. Standar yang digunakan dalam penentuan kelayakan rumah mengacu kepada standar yang diarahkan oleh BAZNAS pusat dan Dinas Pemukiman & Sosial.

Sukabumi Sejahtera berupaya meningkatkan kemampuan para mustahik yang memiliki talenta di bidang usaha. BAZNAS Kabupaten Sukabumi memberikan fasilitas dalam bentuk zakat Mal produktif melalui warung BAZNAS. Ada juga program GM3, yaitu gerakan menghidupkan masjid dan musala dalam bentuk fasilitasi terhadap para jemaah masjid serta DKM dengan kegiatan pemberdayaan di bidang pertanian. Kemudian juga ada program dukungan terhadap Madrasah Diniyah, Takmiliah, Awaliyah yang dibantu setiap tahunnya. Ada pula program generasi emas, yaitu pembibitan qori dan tahfid yang dibiayai oleh kerja sama BAZNAS dengan Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran.

Semua program di atas merupakan perwujudan dan implikasi dari kebijakan regulasi yang ada di Kabupaten Sukabumi, diantaranya Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukabumi nomor 12 tahun 2005 tentang pengelolaan zakat, Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 35 tahun 2016, Instruksi Bupati Nomor 1 tahun 2016 tentang pemungutan zakat infak sedekah bagi para penyedia barang dan jasa di Kabupaten Sukabumi yang mewajibkan para pemborong yang menerima pekerjaan dari pemerintah Kabupaten Sukabumi membayar zakat kepada BAZNAS.

Intruksi Bupati Nomor 4 tahun 2016 tentang Optimalisasi Pemungutan Zakat Infak Sedekah dari Pegawai Negeri Sipil atau ASN. Seluruh pegawai negeri sipil di Kabupaten Sukabumi sudah membayar zakat, infak, sedekah melalui BAZNAS dengan *payroll system*. *Payroll system* dilakukan melalui surat kuasa pemotongan gaji yang diterima pegawai ASN dengan pemotongan langsung oleh bank sebagai pembayaran gaji atau Kas daerah. Kemudian instruksi Bupati Nomor 11 tahun 2018 tentang Pemungutan Zakat Profesi dari Tunjangan Kinerja Daerah. Maka seluruh pegawai negeri sipil Kabupaten Sukabumi sudah membayar zakat, infak, sedekah melalui BAZNAS Kabupaten Sukabumi.

Pada sisi lain BAZNAS melakukan pendekatan-pendekatan dengan membentuk UPZ-UPZ di perangkat daerah yang sifatnya vertikal seperti lembaga Kepolisian Republik Indonesia (UPZ Polres Kabupaten Sukabumi) dan Kejaksaan negeri Kabupaten Sukabumi serta lembaga-lembaga vertikal lainnya.

BAZNAS Kabupaten Musi Banyuasin

Sebelum lahirnya regulasi zakat daerah, pengumpulan zakat, infak, dan sedekah di Kabupaten Musi Banyuasin relatif lebih rendah daripada kabupaten/kota lain. Hal itulah yang kemudian mendorong para amil di BAZNAS Kabupaten Musi Banyuasin untuk melakukan studi banding ke daerah-daerah yang telah memiliki Perda tentang pengumpulan zakat, infak dan sedekah. Studi banding ini atas inisiatif pihak legislatif yang terdorong untuk mencari formula yang tepat dalam pembuatan Regulasi zakat daerah di Kabupaten Musi Banyuasin.

Regulasi zakat daerah dibentuk melalui kajian bersama Kemenkumham Provinsi tentang pola penerapan aturan pengumpulan ZISWAF dan diikuti pula oleh Majelis Ulama Indonesia daerah dan organisasi Islam lain untuk ikut andil berdiskusi. Setelah itu diadakan pembahasan secara resmi bersama DPRD di komisi III tentang rencana Perda tersebut. Pada akhirnya pada bulan maret 2019, hasil diskusi terkait regulasi pengumpulan ZISWAF telah disetujui menjadi sebuah Peraturan Daerah.

Pada tanggal 4 April 2019 telah ditetapkan juga Perbub No. 37 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda No. 1 tahun 2019 tentang Pelaksanaan ZISWAF. Dengan terbitnya aturan tersebut, pihak Sekda menyosialisasikan regulasi tersebut bersama para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan dihadiri oleh bendahara seluruh perangkat daerah di Dinas Pendapatan dan Keuangan daerah. Mulai bulan Mei, diperintahkan kepada seluruh OPD untuk segera membentuk UPZ (unit penghimpun zakat) di seluruh perangkat organisasi daerah masing-masing. Dan juga dimulai menarik zakat sesuai Perbup dan Perda terlebih yang penghasilannya mencapai nishaf dan haul baik melalui gaji maupun tunjangan daerah, maka mereka dipotong dari gajinya 2,5% untuk disetorkan ke BAZNAS. Adapun untuk tunjangan daerah dapat dikeluarkan sendiri zakatnya. Pengumpulan saat ini mayoritas masih sangat tergantung dengan UPZ perangkat daerah (pemotongan gaji dari ASN). Pada umumnya perusahaan tersebut sudah memotong dana zakat melalui kantor pusat masing-masing tidak melalui BAZNAS daerah.

Pada tahap awal, hampir seluruh dinas dan instansi mulai menyetor zakat 2,5% kepada BAZNAS bagi yang benar-benar memenuhi kriteria muzaki, ada sebagian yang hanya memberikan infak. Sedangkan bagi instansi yang belum dapat membayar zakat mereka membuat surat pernyataan untuk memberikan infak.

Untuk pendistribusian yang bersifat konsumtif, BAZNAS Kabupaten Musi Banyuasin bekerja sama dengan pihak kecamatan dan juga pihak pemerintah desa termasuk seluruh desa agar membentuk UPZ di desa masing-masing untuk mencari mustahik yang masuk dalam kriteria 8 *ashnaf* (golongan yang berhak menerima zakat). Bagi calon penerima zakat harus mendapat surat keterangan dari kepala desa bahwa yang bersangkutan telah memenuhi syarat dan kriteria sebagai golongan *ashnaf* miskin atau fakir yang berbentuk pendistribusian konsumtif berupa sembako.

Sedangkan untuk pendistribusian yang sifatnya produktif, BAZNAS Kabupaten Musi Banyuasin bekerja sama dengan Dinas Sosial. Seperti pendistribusian ZIS kepada kelompok peternak kambing (dinas peternakan). Rekomendasi untuk pengadaan bantuan dapat

diajukan dari pihak penyuluh baik peternakan, perikanan, pertanian, dsb. Juga kerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja untuk pelatihan usaha, menjahit pakaian, yang berupa pembelian mesin jahit, obras, dan lain sebagainya. Selain itu pendistribusian dalam bentuk lain juga pernah dilakukan dengan cara bekerja sama dengan pihak organisasi yang berada di Sumatera Selatan, termasuk pendistribusian dalam bentuk bantuan sembako COVID-19.

BAZNAS Kabupaten Musi Banyuasin memberikan bantuan modal kepada pedagang yang terdampak pandemi Covid-19. Sebelum adanya regulasi, BAZNAS hanya dapat memberikan modal Rp1 juta per orang, tetapi sekarang bertambah menjadi Rp1,3 juta per orang. Selain itu, regulasi pengumpulan ZIS di BAZNAS Kabupaten Musi Banyuasin juga berdampak pada besarnya beasiswa yang diberikan, dulunya hanya dapat memberikan beasiswa selama satu semester, tetapi tahun ini dapat memberikan beasiswa per semester sebesar Rp2 juta (4 jt per tahun) kepada 45 siswa.

Mengenai kelembagaan, struktur organisasi BAZNAS Kabupaten Musi Banyuasin telah sesuai dengan aturan BAZNAS. Selain itu, juga dilakukan audit internal terhadap laporan keuangan tiap bulannya dan dilakukan monitoring terhadap kinerja BAZNAS dari aspek syariah oleh Majelis Ulama Indonesia.

Permasalahan yang masih dihadapi BAZNAS Kabupaten Musi Banyuasin, antara lain: 1) Pengumpulan zakat dari masyarakat Non-ASN masih sulit; 2) Pihak masjid-masjid daerah masih sulit untuk menginformasikan saldonya; 3) Belum dapat meningkatkan kesadaran individu maupun lembaga pemerintah untuk bersinergi dalam pengumpulan zakat, infak, dan sedekah; 4) Belum bisa mengajukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) seperti sebelum adanya Perbup.

Jadi, dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa adanya regulasi zakat daerah berdampak besar terhadap pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah di kota tersebut, selain itu berdampak besar pula terhadap pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah kepada para mustahik 8 (delapan) *ashnaf* di BAZNAS Kabupaten Musi Banyuasin. Pendistribusiannya tidak hanya bersifat konsumtif saja akan tetapi juga bersifat produktif berupa pemberian modal kepada pedagang, pelatihan tenaga kerja, pelatihan ternak, beasiswa dan lain sebagainya.

BAZNAS Kota Padang Panjang

BAZNAS di daerah Kota Padang Panjang berperan sebagai lembaga untuk mengentaskan kemiskinan bagi masyarakat Kota Padang Panjang. Peraturan Zakat Daerah Kota Padang Panjang Bab II Pasal 3 pemerintah daerah berkewajiban untuk mengatur dan memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzaki atau mustahik dan amil zakat. Hal ini sudah diatur dalam peraturan daerah Kota Padang Panjang pada Bab II pasal 3 sehingga regulasi untuk penyaluran zakat pada Kota Padang Panjang sudah diatur sedemikian rupa oleh pemerintah daerah tersebut.

Di daerah yang sangat kecil dengan 2 kecamatan yang memiliki 16 kelurahan dan luas kota ± 23.000 hektare dengan jumlah penduduk 55.000 jiwa sehingga dengan APBD Kota Padang Panjang yang melebihi angka 17 miliar membuat pengumpulan di kota tersebut cukup bagus, serta pendapatan di kota Padang Panjang mencapai angka 4,6 miliar di tahun

2020 ini. Implementasi Perda No.7 tahun 2008 telah diterapkan kepada seluruh ASN di Kota Padang Panjang serta anggota DPRD sudah menyalurkan zakat ke BAZNAS Kota Padang Panjang walaupun di posisi tertentu masih ada beberapa orang yang belum menyalurkan zakatnya ke BAZNAS Kota Padang Panjang. Jumlah anggota DPRD di Kota Padang Panjang ada sekitar 20 orang.

Khusus di Bab 7 Pasal 19 ayat 2 untuk zakat profesi PNS, Penyelenggara Pemerintah Lainnya, dan Pegawai BUMN, zakat dikumpulkan oleh bendaharawan gaji yang berada di instansi atau OPD pemerintah tersebut atas persetujuan dari yang bersangkutan yang besarnya sekitar 2,5% dari gaji bulanan yang telah diterima dan belum termasuk tunjangan kinerja mereka yang di tingkat Sumatera Barat merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan daerah-daerah lain di wilayah provinsi Sumatera Barat.

Tantangan yang dihadapi oleh BAZNAS Kota Padang Panjang hingga saat ini adalah dari lingkungan TNI, Polri, BUMN dan beberapa unit kerja lainnya yang belum menyalurkan zakatnya ke BAZNAS Kota Padang Panjang. Hal ini dikarenakan belum adanya perintah dari pimpinan atas sehingga pengumpulan zakat dari unit-unit tersebut belum terakomodir untuk menyalurkan zakatnya ke BAZNAS Kota Padang Panjang.

Strategi yang dapat dilakukan oleh BAZNAS Kota Padang Panjang yaitu dengan meningkatkan fungsi OPD dalam menghimpun dan mendistribusikan zakat di lingkungan dan memanfaatkan media sebagai sarana *branding* serta publikasi dan informasi berbagai kegiatan pengumpulan dan pendistribusian zakat di BAZNAS Kota Padang Panjang

Pada sisi pengumpulan, jumlah muzaki tahun 2016 adalah sebanyak 2.303 orang dengan nilai total pengumpulan zakat sebesar Rp3.722.429.832. Kemudian, terjadi peningkatan jumlah muzaki sebanyak 2259 orang hingga tahun 2020 dengan jumlah pengumpulan zakat Rp4.543.793.634. Langkah selanjutnya adalah melakukan penguatan dari segi manajemen BAZNAS terkait sinergitas aktivitas untuk membangun secara harmonis dengan para muzaki (ASN, Swasta) dan pemangku kepentingan agar mencapai hasil yang maksimal.

Selain itu, BAZNAS Kota Padang Panjang perlu melakukan upaya dalam meminimalkan adanya intervensi dan kepentingan yang menyangkut eksternal untuk mencegah timbulnya persepsi negatif di masyarakat. Pimpinan BAZNAS Kota Padang Panjang juga perlu melakukan *monitoring* dan administrasi atas kinerja staf IT yang bertugas dalam menyebarkan informasi terkait kegiatan BAZNAS ke seluruh lapisan masyarakat melalui media sosial yang tersedia.

Kemudian, tantangan penguatan SDM yang dihadapi oleh BAZNAS Kota Padang Panjang adalah kurangnya ketersediaan tenaga kerja di BAZNAS tersebut serta tidak adanya pelatihan yang tersedia untuk manajemen pemberdayaan SDM dalam pengumpulan dan penyaluran zakat. Strategi penguatan SDM yang dapat dilakukan oleh BAZNAS Kota Padang Panjang antara lain menjalin kerja sama dengan Penyuluh Agama Islam untuk memberi informasi dan nasihat tentang zakat kepada muzaki dan mustahik khususnya di tempat ibadah dan memanfaatkan teknologi internet untuk belajar meningkatkan penguatan SDM secara mandiri.

Selain itu, tantangan yang dihadapi oleh BAZNAS Kota Padang Panjang adalah belum adanya kendaraan operasional yang memadai termasuk tidak adanya ambulans dan kantor BAZNAS masih milik dari Pemerintah Daerah. Strategi yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Padang Panjang dalam hal penguatan sarana dan prasarana ialah dengan: 1) Memanfaatkan kendaraan pribadi pimpinan; 2) BAZNAS Kota Padang Panjang akan berusaha untuk melakukan lobi agar mendapat kendaraan yang layak dari Pemerintah Daerah; 3) BAZNAS Kota Padang Panjang akan membangun kantor baru yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah

Terakhir, tantangan penguatan jaringan yang dihadapi oleh BAZNAS Kota Padang Panjang yaitu adanya kesulitan dalam masalah akses secara langsung kepada beberapa pengusaha di daerah. Sehingga strategi yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Padang Panjang dalam menguatkan jaringan adalah dengan memanfaatkan media sosial berupa *instagram*, *facebook*, dan *whatsapp* untuk memberi informasi perencanaan BAZNAS Kota Padang Panjang dalam hal apapun dan membuat grup antarpimpinan dan pengusaha untuk mempererat silaturahmi secara *virtual* dengan muzaki di masa pandemi.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil analisis implikasi regulasi zakat daerah terhadap pengelolaan zakat di BAZNAS Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat disimpulkan bahwa regulasi pengelolaan zakat di daerah dalam bentuk Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Peraturan Wali Kota, Peraturan Bupati, dan Instruksi Bupati telah memberi dampak positif bagi peningkatan tata kelola dan kinerja BAZNAS Daerah baik dalam pengumpulan zakat maupun penyaluran zakat.

Selain itu, regulasi zakat juga memiliki peran penting dalam penguatan BAZNAS Daerah mulai dari aspek kelembagaan, manajemen, sumber daya manusia, sarana prasarana hingga kepada penguatan jaringan kerja.

Merujuk kepada hasil kesimpulan dan praktik baik pada kelima BAZNAS daerah di atas, dapat dirumuskan rekomendasi sebagai berikut:

1. BAZNAS daerah bersama pemerintah daerah yang belum memiliki payung regulasi zakat daerah perlu mengupayakan penyusunan dan pengusulan serta pengawalan penerbitan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Gubernur/Wali kota/Bupati) khususnya terkait kebijakan pemotongan zakat dari penghasilan ASN.
2. BAZNAS daerah bersama pemerintah daerah yang telah lama memiliki regulasi zakat daerah perlu mereview kembali kemungkinan kebutuhan penguatan atau perluasan teknis implementasi regulasi tersebut dengan mengupayakan penerbitan regulasi tambahan seperti dalam bentuk Instruksi Gubernur/Wali kota/Bupati.
3. BAZNAS daerah bersama pemerintah daerah perlu merancang model pemetaan zakat daerah yang terdiri atas pembagian wilayah operasi, pendataan muzaki dan mustahik, antara BAZNAS Provinsi/Kabupaten/Kota dengan instansi pemerintah yang berhubungan, dan LAZ yang beroperasi di daerah.
4. BAZNAS daerah bersama BAZNAS pusat perlu meningkatkan kualitas manajemen tata kelola zakat daerah melalui audit tambahan, selain keuangan, seperti audit mutu manajemen melalui akreditasi lembaga dan standardisasi pada International Organization for Standarization (ISO).
5. BAZNAS daerah bersama pemerintah daerah perlu menguatkan struktur organisasi kepengurusan BAZNAS dengan memadukan unsur tokoh masyarakat, adat, ulama, dai, TNI, Polri, Kejaksaan, akademisi dan pengusaha.
6. BAZNAS daerah bersama BAZNAS pusat perlu terus meningkatkan kompetensi amil di daerah melalui pelatihan dan sertifikasi, serta penataan jenjang karier amil.
7. BAZNAS daerah bersama BAZNAS pusat perlu terus mengupayakan penguatan jaringan antarlembaga zakat (BAZNAS dan LAZ) baik melalui kerja sama dan MoU, maupun regulasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ascarya & Yumanita, D. (2018). Analisis Rendahnya Pengumpulan Zakat Di Indonesia Dan Alternatif Solusinya (No. WP/9/2018).
- Atabik, A. (2016). Manajemen pengelolaan zakat yang Efektif di Era Kontemporer. ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf, 2(1), 40-62.
- Banyuasin, B. M., & Selatan, P. S. (2018). Bupati Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.
- Bariyah, O. N. (2018). Studi Peraturan Daerah (Perda) Tentang Pengelolaan Zakat di Indonesia. Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat, 1(1).
- BAZNAS, P., Pendistribusian, K. P. D., BAZNAS, P., BAZNAS, K. P. D. P., & Penulis, K. P. (2019). Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ).
- BAZNAS Musi Banyuasin. 2019. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyuasin. <https://BAZNAS.BanyuasinkabupatenGo.Id/Laporan-2/>
- BAZNAS Kabupaten Musi Banyuasin. (2021). Dampak Regulasi Zakat Daerah Terhadap Penguatan BAZNAS Sebagai LPNS. Hasil Forum Group Discussion: Oktober 2021, Universitas Darussalam Gontor
- BAZNAS Kabupaten Sukabumi. (2021). Dampak Regulasi Zakat Daerah Terhadap Penguatan BAZNAS Sebagai LPNS. Hasil Forum Group Discussion: Oktober 2021, Universitas Darussalam Gontor
- BAZNAS Kabupaten Cianjur. (2021). Dampak Regulasi Zakat Daerah Terhadap Penguatan BAZNAS Sebagai LPNS. Hasil Forum Group Discussion: Oktober 2021, Universitas Darussalam Gontor
- BAZNAS Kota Padang Panjang. (2021). Dampak Regulasi Zakat Daerah Terhadap Penguatan BAZNAS Sebagai LPNS. Hasil Forum Group Discussion: Oktober 2021, Universitas Darussalam Gontor
- BAZNAS Provinsi NTB. (2021). Dampak Regulasi Zakat Daerah Terhadap Penguatan BAZNAS Sebagai LPNS. Hasil Forum Group Discussion: Oktober 2021, Universitas Darussalam Gontor
- Beik, I. S. (2009). Analisis peran zakat dalam mengurangi kemiskinan: studi kasus Dompet Dhuafa Republika. Jurnal Pemikiran dan gagasan, 2(1), 1-11.
- Beik, I. S. (2019). Pengelolaan Zakat di Tahun 2019 dan Tantangannya di Tahun 2020. (Hasil Wawancara)
- Bin Mansur, A. (2008). Nawazilu az-Zakat. Darul Miman: Riyadh
- Departemen Agama RI. (2002). Pedoman Zakat 9 Seri. Proyek Peningkatan Zakat Dan Wakaf. Jakarta.
- Firdaus, M., I. S. Beik, T. Irawan, and B. Juanda. (2012). Economic Estimation and Determinations of Zakat Potential in Indonesia. Working Paper Series WP#1433-07. Jeddah: Islamic Research and Training Institute.

- Grindle, M. S. (2004). Good Enough Governance: Poverty Reduction and Reform in Developing Countries. *Governance*, 17(4), 525-548.
- Intruksi Bupati Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemungutan Zakat Infak Sedekah Penyedia Barang dan Jasa
- Intruksi Bupati Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pemungutan Zakat Profesi dari Tunjangan
- Intruksi Bupati Nomor 4 Tahun 2016 tentang Optimalisasi Pemungutan Zakat Infak Sedekah dari Pegawai Negeri Sipil /ASN
- Iqbal, Z. (2014). Enhancing Financial Inclusion through Islamic Finance. Presented at Financial Inclusion Conference, World Bank, Istanbul.
- Januardi, J. (2018). Zakat Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal Masyarakat dan Filantropi Islam*, 1(1), 9-12.
- Mashudi, D. (2012). Menuju Era Zakat Profesional. Bandung: Sagara Publishing.
- Nababan, B.S.P. (2018). Analisis Peraturan Daerah Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Tengah Iklim Kemudahan Berusaha dalam Perspektif Teori Perundang-Undangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 15 No.4, hlm. 263-273.
- Nurhasanah, S., & Suryani, S. (2018). Maksimalisasi Potensi Zakat Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat. *JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 3(2), 185-194.
- Peraturan Bupati Cianjur Nomor 01 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Zakat
- Peraturan Bupati Muba Nomor 37 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2019 Tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah
- Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Infak Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya Berbasis Masyarakat
- Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 09 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat
- Peraturan Daerah Kabupaten Muba Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah
- Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Zakat
- Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Zakat
- Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah
- Peraturan Gubernur NTB Nomor 16 Tahun 2016 tentang Teknis Penyelenggaraan Pengelolaan Zakat
- Peraturan Wali kota Padang Panjang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Peraturan Teknis
- PUSKAS BAZNAS (2018). Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat. Jakarta: Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional & Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah – Bank Indonesia
- Puskas BAZNAS. (2019). Indeks Literasi Zakat: Teori dan Konsep. Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS

Puskas BAZNAS. (2020). Outlook Zakat Indonesia 2020. Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Widiastuti, T., Mawardi, I., Robani, A., & Rusydiana, A. S. (2018). Optimization of Zakat fund management in regional Zakat institution. *Humanities & Social Sciences Reviews*, 6(2), 133-139.

Yahya, I. (2020). Zakat Management in Indonesia: a Legal Political Perspective. *Al-Ahkam*, 30(2), 195-214.

KONTRIBUTOR PENULIS

Muhammad Hasbi Zaenal, Ph.D. adalah Direktur di Pusat Kajian Strategis BAZNAS (Puskas BAZNAS), Republik Indonesia. Ia juga dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Ia memperoleh PhD (2018) dan Master (2012) dari Universitas Kebangsaan Malaysia; dan Lc. bidang Syariah dari Universitas Al-Azhar, Mesir (2009). Saat ini aktif dalam penelitian dan publikasi di Islamic Social Finance seperti zakat, wakaf, dan pengentasan kemiskinan dari pendekatan Islam.

Aisha Putrina Sari, M.S.M bergabung di Puskas BAZNAS pada tahun 2018. Sejak tahun 2020, ia menjabat sebagai Kepala Bidang Indeks Zakat Nasional dan Kaji Dampak (IKA). Tugas utama dari tim IKA meliputi tetapi tidak terbatas pada penulisan kajian-kajian mengenai pengelolaan zakat, dampak zakat, program zakat, serta pengaruh zakat terhadap kemiskinan di Indonesia. Kajian-kajian yang ditulisnya bersama tim IKA diterbitkan dalam bentuk buku, Official News, Puskas Working Paper Series, dan Policy Brief. Paper-paper yang ia tulis telah dipresentasikan dan dimuat di konferensi dan jurnal internasional maupun nasional. Ia dapat dihubungi melalui aisha.sari@puskasbaznas.com

Adhitya Kusuma Zaenardi, S.E bergabung di Puskas BAZNAS sejak tahun 2019 sebagai peneliti junior. Terlibat aktif dalam kajian dan penelitian yang berkaitan dengan pengukuran IZN dan Kaji Dampak Zakat terhadap kemiskinan. Beberapa penelitian telah diikutsertakan dalam konferensi internasional seperti International Conference on Islamic Economics and Finance (ICIEF) oleh Islamic Development Bank dan International Islamic Monetary Economics and Finance Conference (IIMEFC) oleh Bank Indonesia. Ia menyelesaikan studi sarjananya pada program studi Ilmu Ekonomi Universitas Gadjah Mada pada 2018. Ia dapat dihubungi melalui email adhitya.zaenardi@puskasbaznas.com

Dita Anggraini, S.E, peneliti junior Puskas BAZNAS yang bergabung sejak 2019. Memiliki minat dan terlibat aktif dalam kajian dan penelitian yang berkaitan dengan pengukuran Indeks Zakat Nasional dan Kaji Dampak Zakat terhadap kemiskinan. Sebelumnya aktif membantu penyusunan buku Peta Keuangan Mikro Syariah Indonesia dan Model Bisnis Keuangan Mikro Syariah Indonesia yang diluncurkan pada Indonesia Sharia Economic Festival Bank Indonesia. Ia menyelesaikan studi sarjananya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Ia dapat dihubungi melalui email dita.anggraini@puskasbaznas.com

Adib Susilo, S.H.I., M.S.I. adalah dosen di UNIDA Gontor dan saat ini mengemban amanah sebagai Wakil Dekan III Bidang Alumni, Kerja sama, Penelitian, dan Pengabdian FEM. Pendidikan yang ditempuh; KMI Gontor (2007), S1 Institut Studi Islam Darussalam (2011), S2 Univ. Islam Indonesia Yogyakarta (2016). Minat penelitiannya meliputi ekonomi publik islam, ekonomi sosial Islam khususnya perwakafan, perilaku konsumsi, dan literasi ekonomi dan wakaf. Beberapa karyanya memperoleh dana dalam bentuk hibah dan telah dipublikasikan di jurnal bereputasi serta diterbitkan pada penerbit anggota IKAPI. email: adibsusilo@unida.gontor.ac.id

Alfarid Fedro. S.Ag., M.H. adalah dosen di UNIDA Gontor dan saat ini mengemban amanah sebagai Ketua Divisi Penyaluran LAZISWAF Unida Gontor, Ketua Program Pelatihan Kompetensi Mahasiswa Unida Gontor dan Ketua Divisi GISWAF International Centre for Awqaf Studies (ICAST) Unida Gontor. Pendidikan yang ditempuh; KMI Gontor (2009), S1 Institut Darussalam Gontor (2015), S2 Univ. Darussalam Gontor (2020). Fokus kajiannya pada hukum ekonomi Islam dan manajemen islam khususnya hukum dan kebijakan ekonomi syariah, perwakafan serta studi islamisasi manajemen. Beberapa karyanya telah dipublikasikan di jurnal bereputasi. Dia dapat dihubungi melalui alfaridfedro@unida.gontor.ac.id

Apriliana Ika Kusumanisita, M.Sc. adalah Dosen Tetap pada Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Universitas Darussalam Gontor. Gelar Master of Science diperoleh dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 2018. Bidang spesialisasi yang diminati terkait Islamic Banking and Finance terutama pada aspek Behavioral Finance. Dia telah menulis beberapa artikel penelitian, salah satunya yaitu tentang keputusan investasi di lembaga keuangan non-bank yang mendapat dana dalam bentuk hibah internal Universitas Darussalam Gontor. Beberapa karya yang

lain juga terpublikasi dalam jurnal terindeks sinta dengan fokus penelitian pada aspek behavioral finance. Dia dapat dihubungi via email aprilianaikakusumanisita@unida.gontor.ac.id

Atika Rukminastiti Masrifah, M.E.Sy. memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam dan Magister Ekonomi Syariah dari Tazkia Islamic University College. Pada tahun 2018, ia bergabung dengan Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor. Saat ini menjabat sebagai Kepala Penelitian dan Publikasi di *International Centre for Awqaf Studies* (ICAST) UNIDA Gontor. Minat penelitiannya meliputi Ekonomi Islam, Wakaf, Zakat, Usaha Mikro dan Kecil, perbankan dan keuangan Islam. Ia menerbitkan berbagai publikasi dan menyampaikan makalah di konferensi nasional dan internasional. Beberapa artikelnya telah memenangkan hadiah untuk Artikel Terbaik. Karyanya juga baru saja menerima Best Paper Awards pada 6th *Sharia Banking Research Paper Forum* kategori Peneliti Muda di Banjarmasin Kalimantan Selatan. Beberapa karyanya memperoleh dana dalam bentuk hibah dari berbagai lembaga dan organisasi di tingkat nasional dan internasional. atikamasrifah@unida.gontor.ac.id

Fajar Surya Ari Anggara, S.T.P., M.M. memperoleh gelar Sarjana Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya dan Magister Manajemen Universitas Negeri Malang. Pada tahun 2015, ia bergabung dengan Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor. Saat ini menjabat sebagai Kepala Program Studi Manajemen FEM UNIDA Gontor. Minat penelitiannya meliputi Model Bisnis, Branding, MSDM, Tata Kelola dan Budaya Perusahaan, dan Kewirausahaan UMKM. Ia menerbitkan berbagai publikasi dan menyampaikan makalah di konferensi nasional maupun internasional. Beberapa karyanya telah mendapatkan penghargaan. Untuk Artikel juga mendapatkan penghargaan Best Paper Awards pada 9th National Seminar and Conference Forum Manajemen Indonesia di Semarang Jawa Tengah. Karya internasional tergabung bersama para peneliti kolaboratif antar bangsa berupa buku Cross Border SMEs: Malaysia Indonesia. Peran terakhir adalah menjadi juri kompetisi ide bisnis International Mobility Student 2021 yang diselenggarakan oleh FEM USIM Malaysia. Ia dapat dihubungi di fajarsurya@unida.gontor.ac.id

Dr. Khoirul Umam, M.Ec. memiliki kepakaran di bidang Islamisasi Ilmu Ekonomi dan Ekonomi Moneter Islam. Ia menerima B.A. di *Islamic Finance* dari Institut Studi Islam Darussalam (ISID) Gontor pada tahun 2003, kemudian gelar M.A. di bidang Ekonomi dari Universitas Islam Internasional, Malaysia pada tahun 2007 dan gelar Dr. pada bidang Ekonomi Islam di Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Dia telah menerbitkan sejumlah artikel di bidang Keuangan Islam dan Ekonomi Moneter. Dia ikut menulis buku terbarunya dengan Prof. Dr. Hamid Fahmy Zarkasyi, M.A., M.Phil. dan buku ini telah diterbitkan oleh LAP, Jerman. Email Umam adalah khairulumam@unida.gontor.ac.id.

Meichio Lesmana, M.E. adalah dosen di UNIDA Gontor, Pendidikan yang ditempuh; KMI Gontor (2014), S1 Universitas Darussalam Gontor (2018), S2 Univ. Islam Indonesia Yogyakarta (2021). Minat Penelitiannya meliputi ekonomi publik islam, ekonomi sosial Islam khususnya perwakafan, perilaku konsumsi, dan literasi ekonomi dan wakaf. Beberapa karyanya telah diterbitkan di jurnal bereputasi baik Nasional maupun Internasional. email: meichiolesmana@unida.gontor.ac.id

Mohammad Ghozali, S.H, M.A. Ph.D. adalah dosen di Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan Pasca Sarjana Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Darussalam Gontor. Menyelesaikan Program Strata 1 di Fakultas Hukum Jurusan Hukum Perdata di Universitas Negeri Jember tahun 1993, Program Strata 2 Magister Prodi Hukum Islam di Universitas Muhammadiyah Malang dengan Predikat Cumlaude tahun 2008, Program Strata 3 di Universiti Malaya of Malaysia APIUM Prodi Syariah Kepengurusan tahun 2014. Aktif di Lembaga Education of Muamalat, MIUMI Malang dan ICMI Malang dengan kepakaran Ekonomi Syariah. Aktif sebagai narasumber tetap dalam kajian Muamalah Syariah, Seminar Kewirausahaan Syariah, Lembaga Keuangan Syariah. Memiliki lebih dari 60 lebih karya tulis berupa artikel yang telah diterbitkan baik di Jurnal Scopus, Prosiding, Jurnal Internasional, Nasional ataupun Lokal. Aktif melakukan penelitian baik yang di dana dari Internal ataupun dari Kemenristek DIKTI, memiliki belasan HKI sebagai bukti karya Intelektual, dan memiliki 5 karya buku, terdiri 1 buku ajar Kewirausahaan Syariah, 2 buku referen Pandangan Para Ulama Madzhab Terhadap Hak Waris Orang Yang Hilang, Pedoman Praktis Perawatan Jenazah, 2 buku Monograf ber-ISBN Panduan Praktis Zakat Pertanian: Dusun Jintap Desa Wonoketro, Kec. Jetis Kabupaten Ponorogo, Pengelolaan Bencana Longsor Kabupaten Ponorogo dari Aspek Sosiologis. Alamat email mohammadghozali@unida.gontor.ac.id telp 081333432800

Mohammad Zen Nasrudin Fajri, M.Ec. adalah seorang Peneliti, Dosen Tetap program studi Ekonomi Islam sekaligus Kepala Bagian Keuangan di Universitas Darussalam Gontor. Dia telah menempuh program magister ekonomi di International Islamic University Malaysia. Konsentrasi penelitian yang diminati adalah bidang ekonomi pembangunan Islam, pemikiran ekonomi Islam, filantropi Islam dan Keuangan Islam. Alamat E-mail mzennasrudin@unida.gontor.ac.id

Mufti Afif, Lc., M.A. adalah dosen di UNIDA Gontor dan saat ini mengemban amanah sebagai Kepala Program Studi Ekonomi Islam dan Wakil Direktur International Centre for Awqaf Studies (ICAST) di kampus tersebut. Pendidikan yang ditempuh; KMI Gontor (2002), S1 Univ. Al-Azhar Mesir (2008), S2 Univ. Gadjah Mada (2012). Fokus kajiannya pada ekonomi sosial Islam khususnya perwakafan dan studi keislaman lainnya seperti Ushul Fikih, Tafsir dan Hadis EKonomi. Beberapa karyanya telah dipublikasikan di jurnal bereputasi dan diterbitkan pada penerbit anggota IKAPI. email: muftiafif@unida.gontor.ac.id

Muhammad Abdul Aziz, S.H.I., M.Si. adalah Dosen Tetap sekaligus Kepala Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Darussalam Gontor. Gelar Magister Sains diperoleh dari Universitas Indonesia. Minat penelitiannya meliputi ekonomi islam, filantropi Islam, dan hukum ekonomi syariah. Alamat e-mail mabdulaziz@unida.gontor.ac.id

Muhammad Irkham Firdaus, M.H. adalah seorang Peneliti, Dosen tetap program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Darussalam Gontor. Dia telah menempuh program Magister Hukum di Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta. Konsentrasi penelitian yang diminati adalah Hukum Ekonomi Syariah, Ekonomi Islam, Lembaga keuangan Islam. Alamat e-mail irkham.firdaus@unida.gontor.ac.id

Royyan Ramdhani Djayusman, M.A., saat ini sedang menempuh program *Ph.D in Economics* dengan topik penelitian '*Muslims' giving behaviours*' di Kingston University London. Ketertarikannya pada dunia zakat dimulai pada saat ia menulis skripsi S1 dengan tema '*Nadzariyatu al-Istismaar az-Zakawi fi al-Iqtishad al-Islamy*' (Konsep Investasi Zakat dalam Ekonomi Islam) di Institut Studi Islam Darussalam (ISID) Gontor. Kemudian dilanjutkan pada saat ia menyelesaikan tesis dengan topik 'Implementasi Investasi Zakat dan Pengaruhnya terhadap Kesejahteraan Dhuafa Buruh Tani' pada program magister Ekonomi Islam di Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Semasa mahasiswa di Yogyakarta, ia ikut aktif dalam aktivitas pengelolaan zakat dengan menjadi sukarelawan *Community Empowerment* dan *Emergency Rescue Team* Rumah Zakat dalam program penyaluran zakat ke berbagai daerah di Provinsi DI Yogyakarta. Di samping mengajar sebagai dosen tetap pada program studi Ekonomi Islam UNIDA Gontor, ia juga berkesempatan menjadi wakil direktur LAZISWAF, sebuah Lembaga zakat kampus, dari tahun 2013-2019. Ia sangat tertarik pada penelitian dengan tema zakat, ekonomika publik, dan keuangan Islam. Email: royyan@unida.gontor.ac.id

Soritua Ahmad Ramdani Harahap, M.H. memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam dan Magister Hukum Ekonomi Syariah dari Universitas Darussalam Gontor. Saat ini diberikan amanah sebagai Sekretaris Prodi Manajemen Universitas Darussalam Gontor. Minat penelitiannya meliputi Ekonomi Islam, Hukum Ekonomi Syariah, Manajemen Sumber Daya Manusia Islami, dan Maqashid syariah. Ia menerbitkan berbagai publikasi dan menyampaikan makalah di konferensi nasional dan internasional. Salah satu artikelnya mendapatkan penghargaan "Silver Award" dan "Best Article Award: Islamic studies" pada i-WIN Library International Article Competition 2021 dengan judul Maqashid Al-Shari'ah Views on Islamic Banking According to Imam Ghazali and Ibn Ashur. Ia dapat dihubungi melalui email soritua@unida.gontor.ac.id

Yunita Wulandari, M.H. memperoleh gelar Sarjana dan Magister Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Darussalam Gontor. Karya ilmiah dan publikasinya telah diterbitkan di jurnal nasional dan atau menyampaikan makalah di konferensi nasional atau Internasional dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah, Wakaf, dan Manajemen Sumber Daya Manusia. Saat ini ia sebagai dosen tetap Hukum Ekonomi Syariah Universitas Darussalam Gontor dan sekretaris International Centre for Awqaf Studies (ICAST) Universitas Darussalam Gontor. Ia dapat dihubungi melalui email yunita.wulan@unida.gontor.ac.id

ISBN 978-623-6614-97-6

Pusat Kajian Strategis BAZNAS

Jl. Matraman Raya No.134, Kb. Manggis, Kec. Matraman,
Jakarta 13150